



2024

LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**

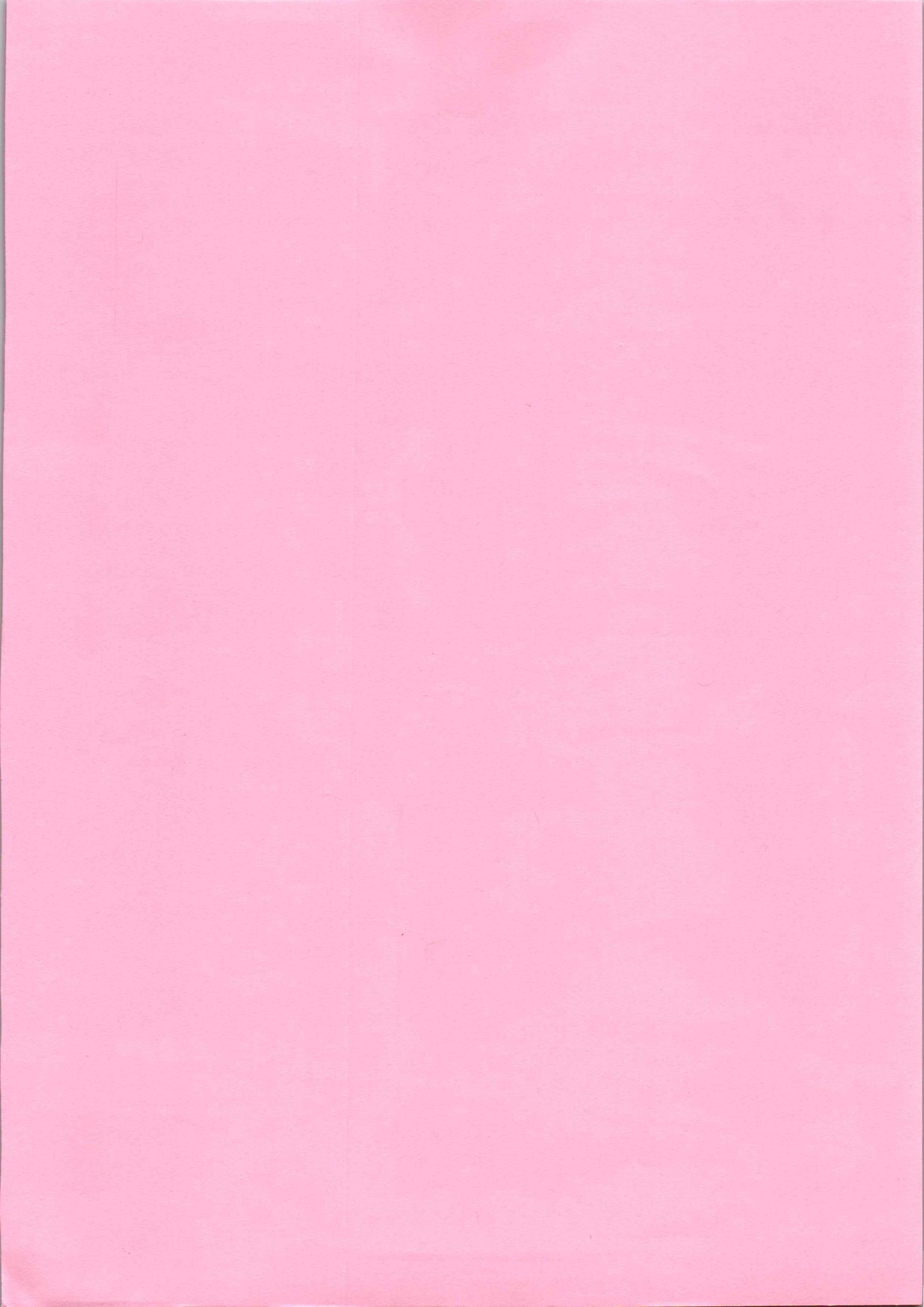


LAPORAN KINERJA

DINAS SOSIAL DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT

TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA





KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wa'rahmatullahi wa'barakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH Subhana Wa'ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur dan Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.

Bab IV Penutup.



Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat Pemerintah Daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2024. Semoga Allah Subhana Wa'ta'ala senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarakan,Januari 2025

Kepala Dinas,

ARBAIN, SE, M. AP

NIP. 19680318 199403 1 007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun Keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024. Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, Selain mengacu pada Indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (Satu) visi, 2 (Dua) misi, 2 (Dua) tujuan, 5 (Lima) Sasaran Strategis dan 5 (Lima) Indikator Kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja tahun Keempat RENSTRA Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 89,01%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.393.559.206,- dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.486.724.616,- atau .87,73%.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 5 (Lima) sasaran yang mencakup 5 (Lima) Indikator Sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 mencapai 89,01% atau bermakna tinggi Dengan uraian : 4 (Empat) sasaran sangat tinggi.

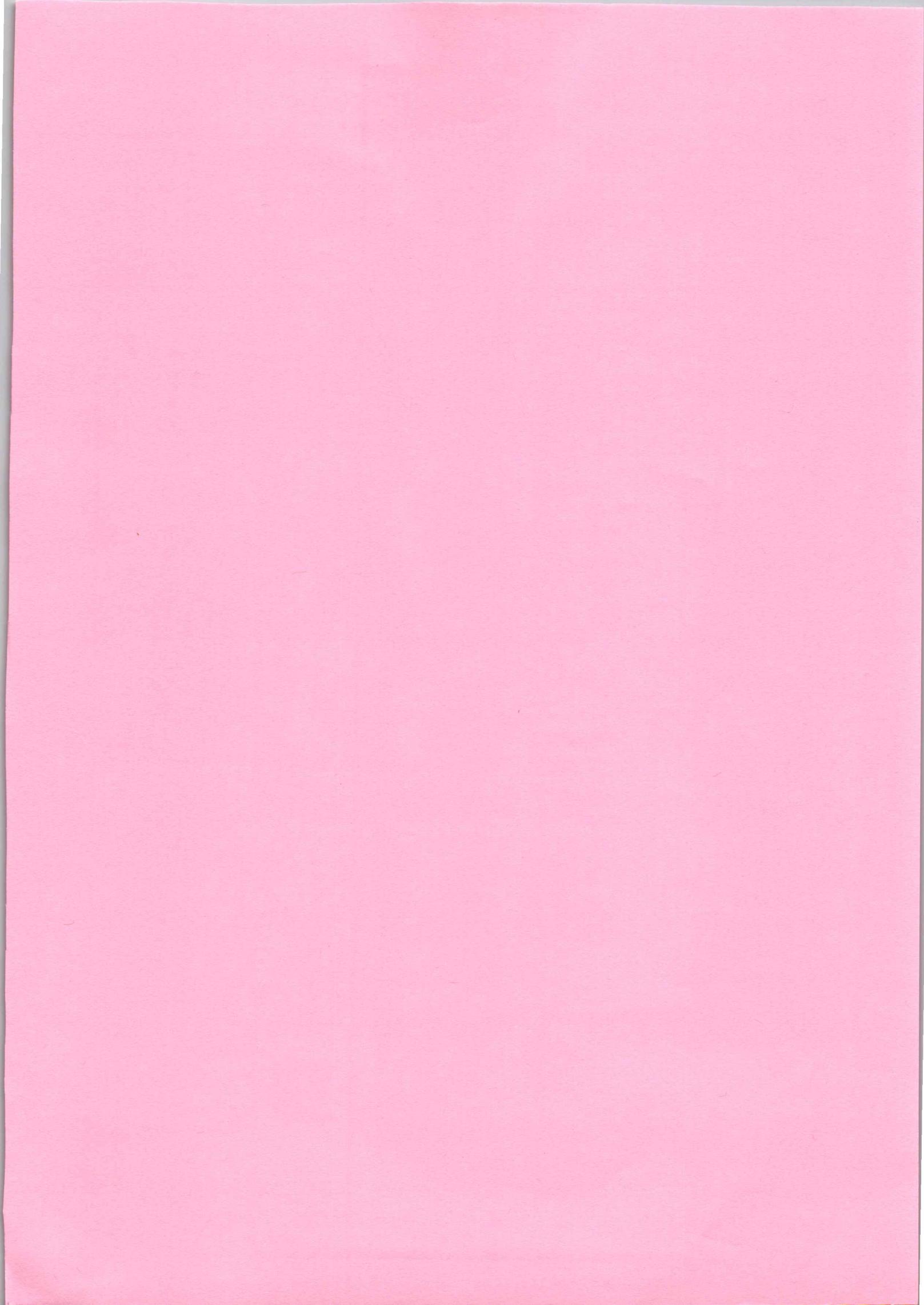
Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan





berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

Tim Penyusun LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024,





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Aparat Pemerintah.....	5
D. Isu Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	10
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Visi Kota Tarakan 2014-2019	16
B. Misi Kota Tarakan 2014-2019	16
C. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.....	19
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
E. Indikator Kinerja Utama	31
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Pengukuran Kinerja	35
B. Analisis Pengukuran Kinerja	39
C. Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	90
BAB IV	
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Tindak lanjut rekomendasi	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Tarakan.....	5
Tabel 1. 2 Data Tenaga Honorer Di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	20
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024.....	22
 Tabel 2. 3 Program Dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023.....	 24
 Tabel 2. 4 Program dan Kegiatan Pendukung Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024.....	 29
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama DINSOSPM Tahun 2019-2024	32
Tabel 3.1 Nilai Peringkat Kinerja <i>DINSOSPM Tahun 2024</i>	36
Tabel 3.2 Capaian Kinerja DINSOSPM Tahun 2024	37
Tabel 3.3 Predikat Nilai Capaian Kinerja DINSOSPM Tahun 2024	38
Tabel 3.4 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Vantuan Sosial dan Tertangani Tahun 2024	42
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)Tahun Keempat 2024	45
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)Tahun 2020- 2024	45
Tabel 3.7 Data Pemutakhiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024	48
Tabel 3.8 Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2024	49
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis di Luar Panti Tahun Keempat 2024	54
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan& Pengemis di Luar Panti Tahun 2020- 2024	54
Tabel 3.11 Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Tahun Keempat 2024	63



Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Tahun 2020- 2024	63
Tabel 3.13 Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Tahun Keempat 2024	69
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Tahun Keempat dan Sosial Tahun 2020- 2024	70
Tabel 3.15 Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Keempat 2024	74
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Keempat dan Sosial Tahun 2020- 2024	74
Tabel 3.17 Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Keempat 2024	78
Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun Keempat Tahun 2020- 2024	78
Tabel 3.19 Data Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang Berpartisipasi Membangun Kelurahan Kota Tarakan Tahun 2024	81
Tabel 3.20 Capaian Sasaran Meningkatnya Kompetensi Profesi Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun Keempat 2024	86
Tabel 3.21 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Keempat 2024	87
Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Keempat dan Tahun 2020- 2024	88
Tabel 3.22 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	91
Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024	93
Tabel 3.24 Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan DINOSOPM Kota Tarakan	97
Tabel 3.25 Perbandingan Anggaran	98



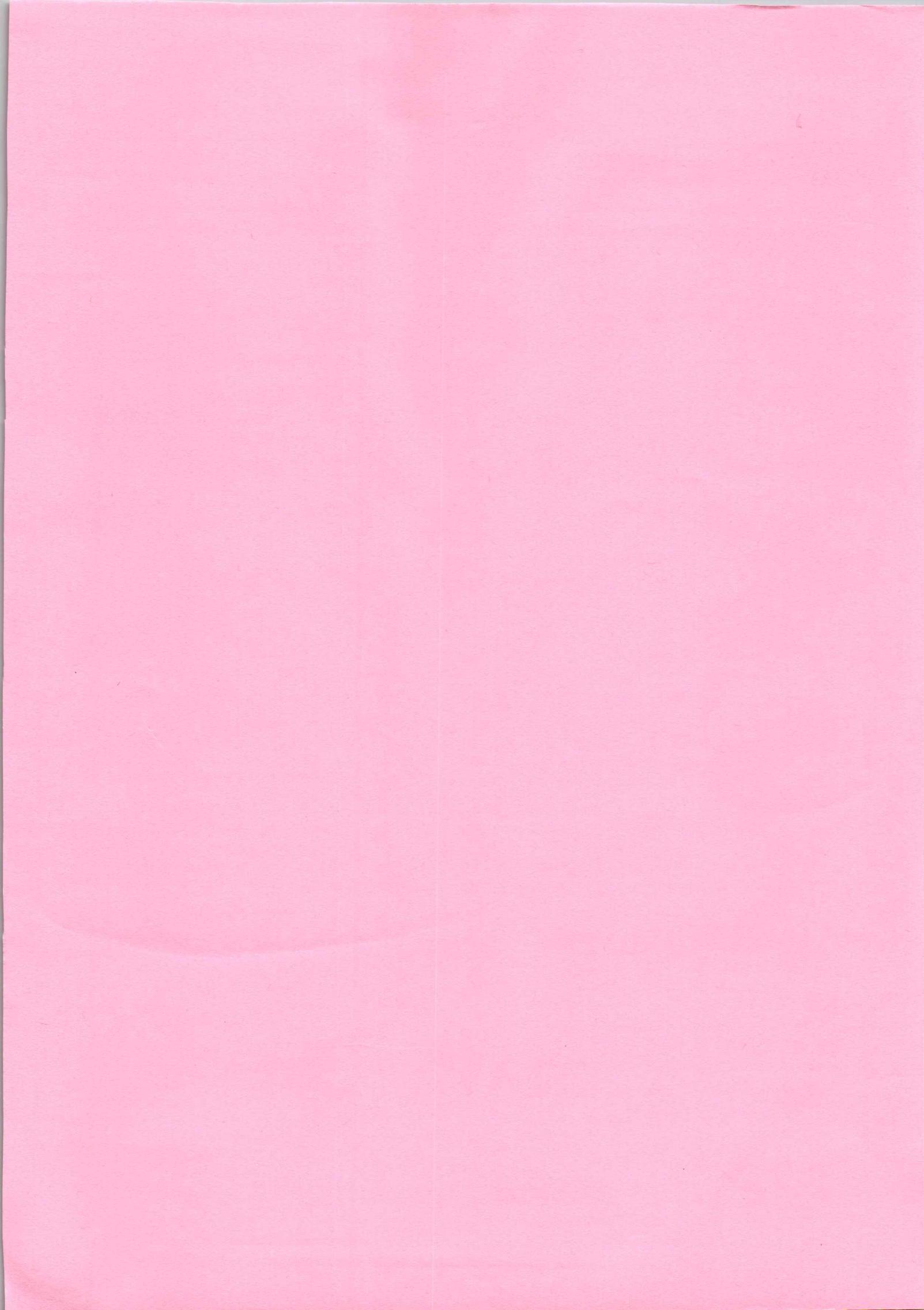
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur organisasi Dinas Sosial San Pemberdayaan Masyarakat	4
Gambar 1.2 Diagram SDM berdasarkan jenis kelamin.....	6
Gambar 1.3 Diagram Dukungan SDM DinsosPM.....	6
Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Gambar 1.5 Grafik Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 3.1 Pengukuran IKU DINSOSPM Tahun 2024.....	38
Gambar 3.2 Rapat Evaluasi Program Sembako Untuk Bantuan Sosial (Kegiatan PPKS).....	39
Gambar 3. 3 Rapat Evaluasi Program	40
Gambar 3. 4 Rapat Evaluasi Kinerja TKSK dan PSM Terkait Data PPKS Kota Tarakan.....	40
Gambar 3. 5 Dokumentasi Monitoring dan Reviu.....	42
Gambar 3. 6 Penyerahan Kartu KKS KPM PKH Di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	42
Gambar 3. 7 Pertemuan P2K2 KPM PKH	43
Gambar 3. 8 Diagram Realisasi Capaian Sasaran Strategis 1	45
Gambar 3. 9 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	45
Gambar 3.10 Dokumentasi Penyaluran Langsung ke Rumah KPM BPNT	50
Gambar 3. 11 Diagram Realisasi Capaian Sasaran Strategis 2	54
Gambar 3. 12 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	54
Gambar 3. 13 Dokumentasi Penyediaan Alat Bantu	57
Gambar 3. 14 Dokumentasi Penyediaan dan Penyerahan Alat Bantu	57
Gambar 3. 15 Dokumentasi Penyediaan Alat Bantu Tongkat.....	58
Gambar 3. 16 Penyediaan dan Penyerahan Alat Bantu Kepada Masyarakat	58
Gambar 3. 17 Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Kepada Masyarakat	58
Gambar 3. 18 Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu Kursi Roda	59
Gambar 3. 19 Dokumentasi Pemberian Layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	60
Gambar 3. 20 Diagram Realisasi Capaian Sasaran Strategis 3	62
Gambar 3. 21 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	63
Gambar 3. 22 Bantuan bencana angin kencang di kelurahan karang Rejo tgl 13 Januari 2024	65
Gambar 3. 23 Bantuan bencana kebakaran rumah kelurahan selumit pantai tgl 26 Januari 2024	65
Gambar 3. 24 Bantuan bencana banjir dikelurahan juata kerikil RT 02 Tahun 2024.....	66
Gambar 3. 25 Penyerahan bantuan bencana kebakaran rumah d kelurahan mamburungan timur	



tanggal 22 April 2023	66
Gambar 3. 26 Penyerahan bantuan bencana kebakaran d kelurahan sebengkok	67
Gambar 3. 27 Diagram Realisasi Capaian Sasaran Strategis 4	69
Gambar 3. 28 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	70
Gambar 3. 29 Kegiatan TMP Kota Tarakan Tahun 2024	71
Gambar 3. 30 Diagram Realisasi Capaian Sasaran Strategis 5	74
Gambar 3. 31 Kegiatan Penerbitan Izin dan rekomendasi Tahun 2024	75
Gambar 3. 32 Diagram Realisasi Capaian Sasaran Strategis 6	78
Gambar 3. 33 Grafik Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	78
Gambar 3. 34 Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Terdata	81
Gambar 3. 35 Jumlah Lembaga Masyarakat Yang AKTIF	82
Gambar 3. 37 Diagram Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	88
Gambar 3. 38 Diagram Capaian KINERJA Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Capaian KINERJA Sasaran Strategis 8	88
Gambar 3. 39 Dokumentasi Penerima Penghargaan Tahun 2024	99
Gambar 3. 40 Dokumentasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024	100







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaku unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 2019-2024; (2) rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024, dan (3)



Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Bidang Sosial, terdiri atas :

1. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial Serta Penanganan Bencana;
2. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; dan
3. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :

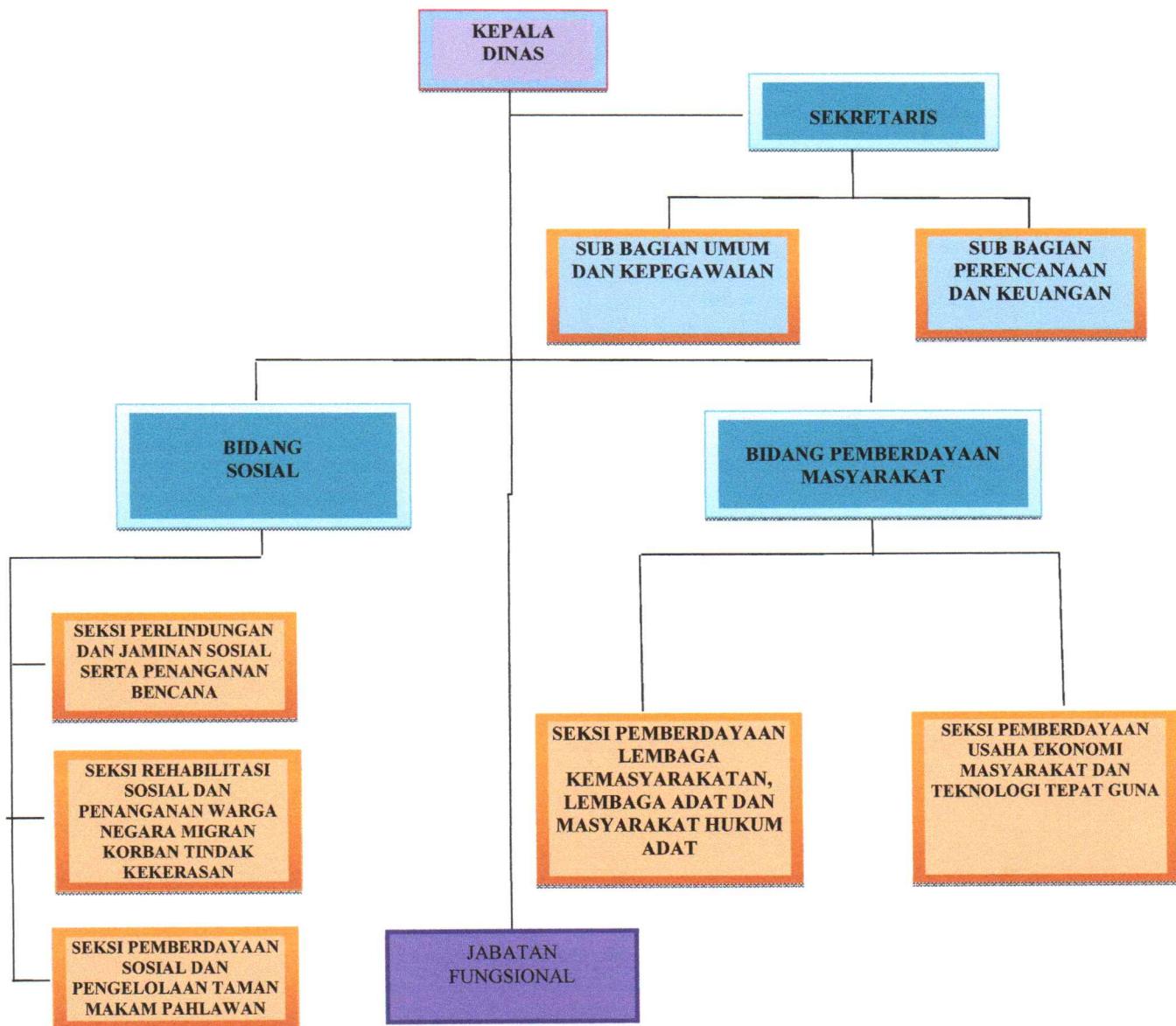
1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
2. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.





STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN



Gambar 1. 1. Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 DATA APARATUR SIPIL NEGARA

**DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA ARAKAN
PER JANUARI 2024**

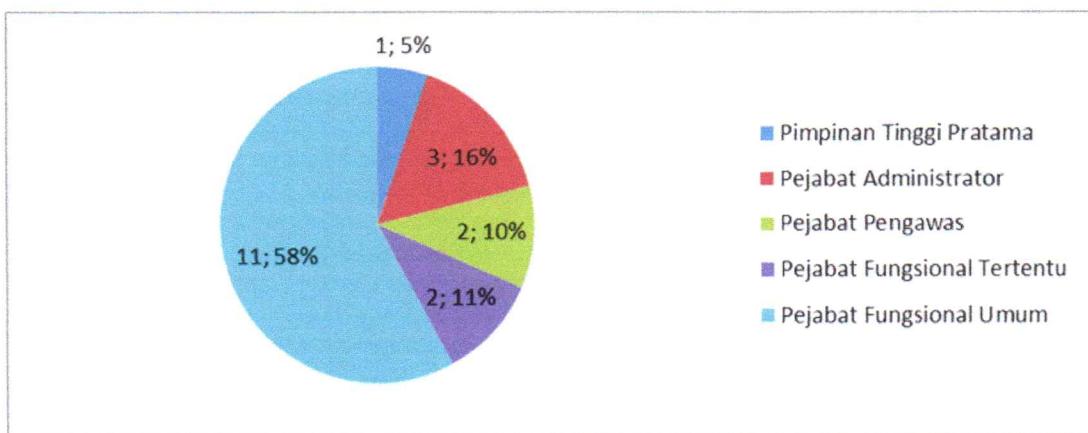
No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai :	29	33	62
	a. PNS	11	10	21
	b. Honor Kontrak	18	23	41
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :	11	10	21
	a. Golongan IV	4	1	5
	b. Golongan III	7	9	16
	c. Golongan II	-	-	-
	d. Golongan I	-	-	-
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :	7	4	11
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	-	1	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2
	e. JFT	3	2	5
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :	10	13	23
	a. S2	3	1	4
	b. S1	4	8	12
	c. D3	1	1	2
	d. SLTA	2	1	3
	e. SLTP	-	-	-
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan	5	4	9
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	1	3
	c. Diklat PIM IV	1	2	3



Gambar 1. 2 Diagram SDM berdasarkan jenis kelamin Sumber :

Data diolah DINSOSPM 2024

Komposisi Sumber Daya Manusia DINSOSPM menurut Jabatannya meliputi 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 3 (tiga) orang Pejabat Administrator yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Sosial dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2 (dua) orang Pejabat Pengawas yaitu Kasubag Umum Dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan, 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) hasil Penyetaraan atau disebut juga Sub Koordinator, 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional Umum dan dengan formasi seperti pada tabel dibawah ini :

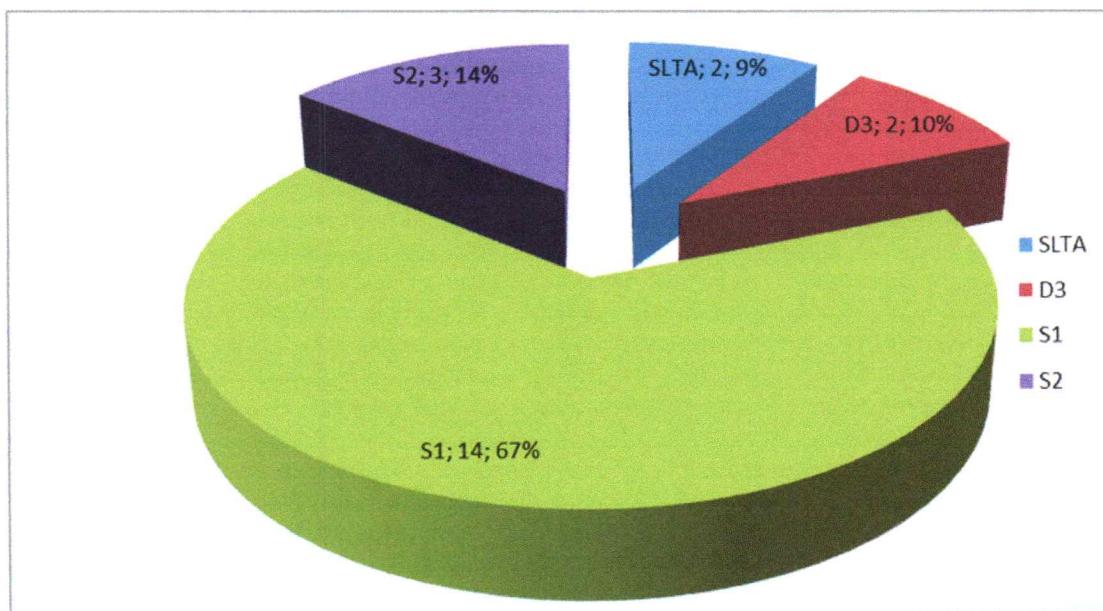


Gambar 1. 3 Diagram Dukungan SDM DINSOSPM Sumber :

Data diolah DINSOSPM 2024



Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 4 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Data diolah DINSOSPM 2024

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat cukuplah besar untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebesar 9% , D3 sebesar 10%, Strata satu (S1) berjumlah 14 orang atau sebesar 67% artinya hampir separuh pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ada pada tingkat pendidikan S1. Kemudian ada 3 Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan hingga strata dua (S2) atau sebesar 14% dari total pegawai.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Selain jumlah ASN yang memadai, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga didukung Tenaga Honorer/juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan



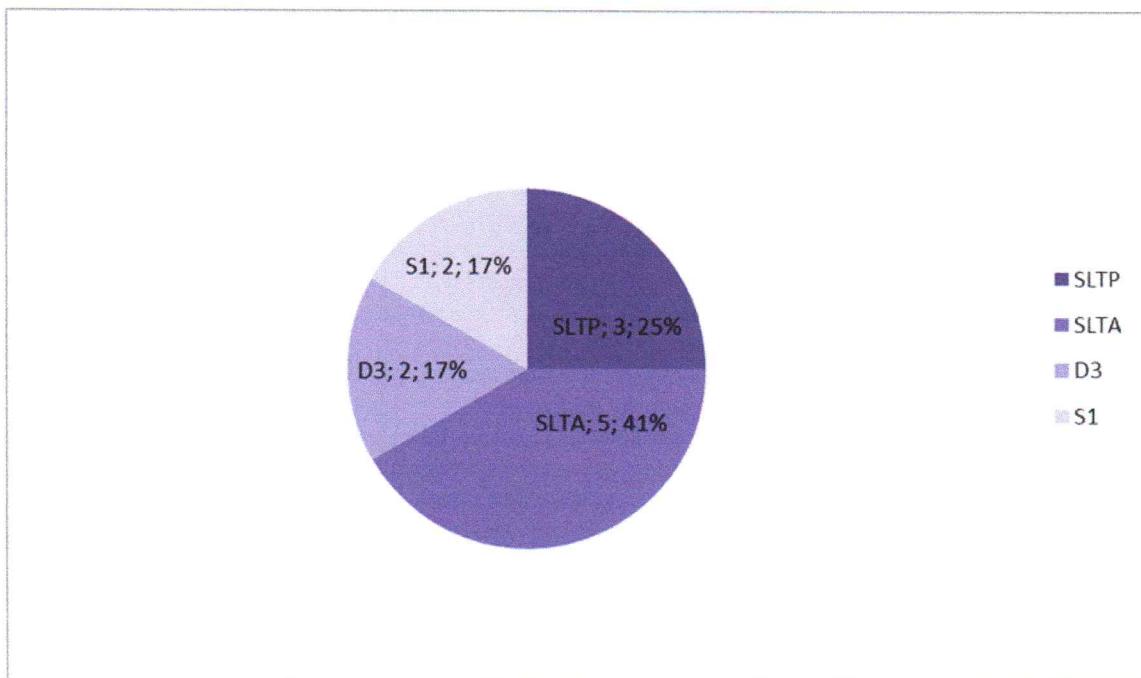
yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah : Kecamatan dan Kelurahan/Kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kota Tarakan. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), karang Taruna dan Pendamping Sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial. Selain komposisi jumlah ASN yang memadai, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat juga didukung Tenaga Honorer dengan komposisi tenaga honorer seperti pada gambar berikut :

**Tabel 1. 2 Data Tenaga Honorer
Di Lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Tarakan
Per Januari Tahun 2024**

NO	TENAGA KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN									KET
		L	P	S2	S1	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	TS		
1	Honorer Administrasi	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-		
2	Petugas Keamanan	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-		
3	Petugas Kebersihan	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-		
JUMLAH		8	4	-	2	2	-	5	3	-	-		

Sumber : Data diolah DINSOSPM 2024

Komposisi tenaga honorer berdasarkan Pendidikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. 5 Diagram Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber : Data diolah DINSOSPM 2024

Berdasarkan data yang disajikan di atas, jumlah pegawai selain ASN adalah 12 orang dengan skema tingkat pendidikan Sarjana sebesar 17%,D3 sebesar 17%, sebagian besar SLTA sebesar 41% dan SLTP sebesar 25%. Dengan skema jumlah dan tingkat Pendidikan ASN dan Non ASN DINSOSPM serta kemampuan masing-masing pegawai yang telah memahami tugas pokok dan fungsinya dan bekerja secara profesional, diharapkan dapat menjadi potensi besar bagi DINSOSPM dalam mendukung kinerja dinas mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kota Tarakan.



D. ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat diambil sari sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, yang bertugas membantu Walikota Tarakan selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berusaha melakukan analisis terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kaltara serta telaahan tata ruang wilayah, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) Isu Strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi PMKS
2. Belum Optimalnya Layanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti
3. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kessos
4. Belum Maksimalnya Pemberdayaan dan Pembinaan PMKS
5. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya Masyarakat.
6. Belum Optimalnya Birokrasi dan Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat, maka dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu permasalahan pada bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu adanya Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi sosial.
2. Belum akuratnya Data Kemiskinan Kota Tarakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan.
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.
4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PMKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.
5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Tarakan. (bukan kewenangan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)
6. Belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.
7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Kota Tarakan.



8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal.
9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi kota dalam menangani korban tindak kekerasan.
10. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PMKS di Kota Tarakan.
12. Masih tingginya kelompok keluarga miskin di Kota Tarakan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.
13. Masih tingginya jumlah disabilitas yang belum terampil.
14. Faktor penurunan keharmonisan keluarga.
15. Belum adanya Peraturan Wali Kota terkait Gelandangan dan Pengemis.
16. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
17. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur Kelurahan terkait pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Kelurahan serta peraturan yang terkait.
18. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat kelurahan.
19. Belum optimalnya ketersediaan Profil Kelurahan di Kota Tarakan.
20. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan.
21. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Kelurahan) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit).

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam kurun waktu



2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk penanganan dan pelayanan sosial karena :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat.
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PMKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

2. Belum Maksimal Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/Swadaya Masyarakat

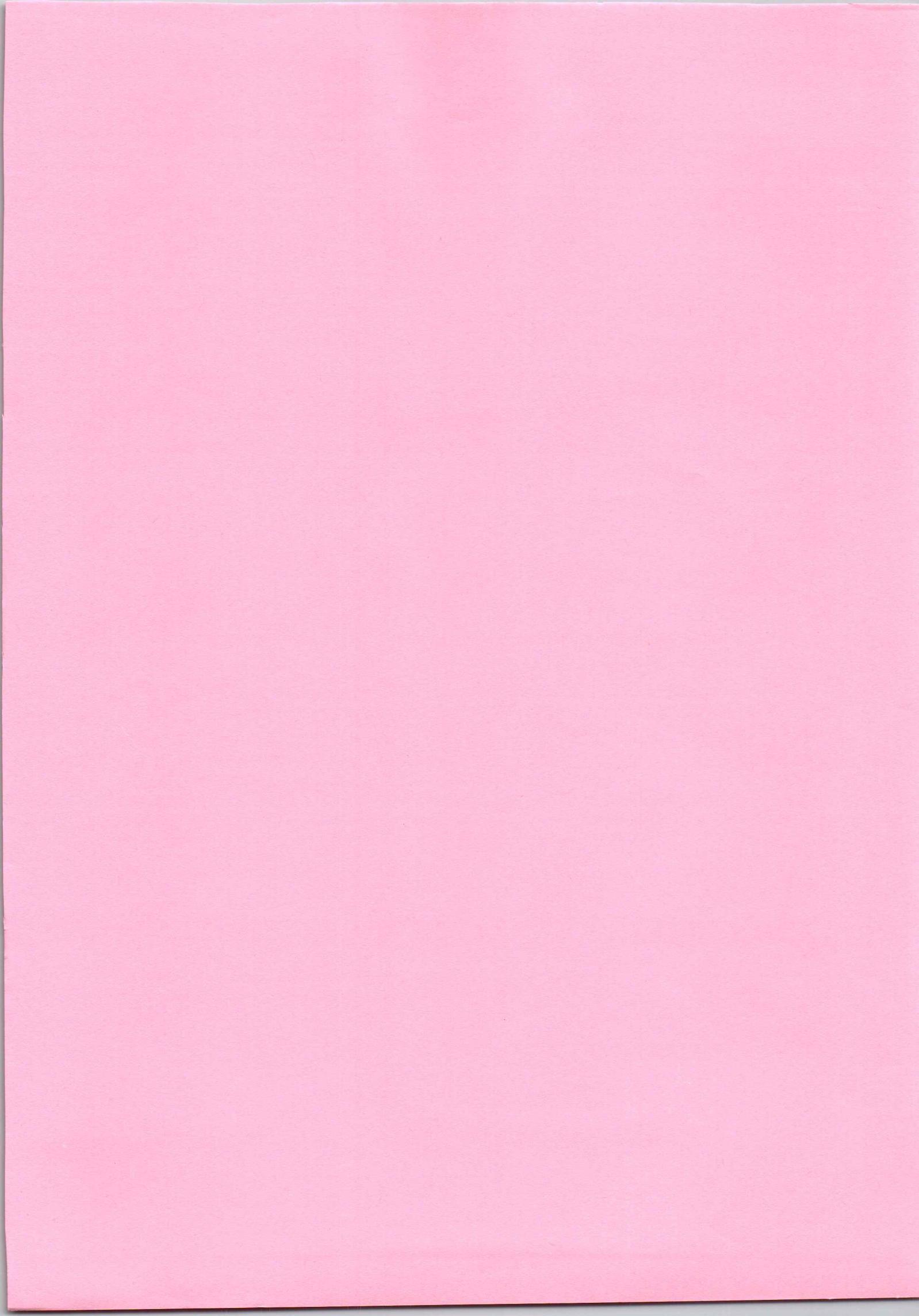
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang pemberdayaan masyarakat.
- b. Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan tingkat kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat kelurahan.
- c. Belum tersedianya Data Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penggambaran potensi kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai



bahan dasar perencanaan kelurahan.

- d. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
- e. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan Kelurahan.
- f. Belum terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2007.
- g. Belum terlaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan yang sesuai dengan kemajuan jaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaan masyarakat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan Kelurahan.
- h. Minimnya penganggaran untuk penanganan Kelembagaan Masyarakat yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Antar SKPD dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan



tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Kota Tarakan Th. 2019 - 2024

Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, disertai rencana kerja serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tarakan.

Pernyataan Visi, Misi Kota Tarakan periode 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi dan Misi Kota Tarakan. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, adalah:

“Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera

melalui *Smart City*”

B. Misi Kota Tarakan Tahun. 2019 - 2024

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.



2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2019-2024, Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
3. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah.

Disamping merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka ditetapkan



Indikator Sasaran dalam periode Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - a. Indikator : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti
 - a. Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial.
 - a. Indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah
4. Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Indikator : Persentase pengelolaan TMP.
5. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial
 - a. Indikator : Persentase PSKS Yang Terlatih.
6. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan
 - a. Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
 - b. Indikator : Persentase kelompok usaha Ekonomi masyarakat, posyantek, penggiat dan pelaku teknologi tepat guna (TIG)
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Indikator : Nilai SAKIP.

Sasaran pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah memberikan pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk penyuluhan, pelatihan ketrampilan, praktik belajar kerja dan pemberian bantuan sosial yang mengutamakan pemberdayaan



kelembagaan masyarakat dan penilaian LKIP.

Sebagaimana dihasilkan pada Sasaran Pelayanan Jangka Menengah sesuai dengan tabel berikut dibawah ini :

dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Berikut ini keterkaitan visi dan misi Kota Tarakan dengan tujuan dan sasaran DINSOSPM beserta indikator dan targetnya pada tabel 2.1 seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

TUJUAN PERANGKA T DAERAH	INDIKATOR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	DIFINISI	TARGET AWAL RENSTR A	2021	2022	2023	2024
Meningkatn ya kualitas kesejahteraa n Penyandang Kesejahtera an Sosial (PMKS)	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahtera	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Percentase kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PPKS YANG MENERIMA BANTUAN DIBAGI DENGAN JUMLAH Ppk's YANG TERDATA	74,25	78,00	80,00	82,00
		Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS (Balita) Terlantar, Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dikali 100%	100,00	100,00	100,0	100,0	



			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dibagi jumlah korban bencana alam dan sosial dikali 100%	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dibagi jumlah korban bencana alam dan sosial dikali 100%	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
		Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pengelolaan TMP	Jumlah pengelolaan TMP	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS Yang Terlatih	Jumlah PSKS Yang Terlatih dibagi jumlah tenaga PSKS dikali 100%	41,00	46,00	50,00	65,00	75,00
			Persentase penerbitan izin dan rekomendasi	Persentase penerbitan izin dan rekomendasi	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi dengan jumlah lembaga masyarakat yang aktif dikali 100%	100%	97,00	98,00	99,00	100,0
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Persentase tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya tata kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	-	64,00 / B	66,00 / B	70,00 / B	72,00 / B

Sumber : Renstra Perubahan DINOSOPM Tahun 2019-2024



D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Kebutuhan Dasar Dan Rehabilitasi Sosial	85%
2	Terwujudnya Kemampuan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Meningkat Kemampuannya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%
3	Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Nilai Tingkat Kepuasan Pengunjung	Puas
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP/Predikat	72/BB



Untuk mencapai 5 (Lima) sasaran strategis yang terdiri atas 5 (Lima) indikator kinerja sasaran di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkanlah strategi melalui 8 (delapan) program kerja, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.7.393.559.206,-

Adapun Program/kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung sasaran strategis DINOSOPM tertuang pada tabel seperti dibawah ini :



Tabel 2. 3 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	R p
1	2	3	4	5	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Meningkat Kemampuannya Dalam Penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	Rp. 99.836.580
	Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	99.836.580
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	Rp.197.002.120
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Rp.175.026.650
2		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	49.956.420
3		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.985.250
4		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	57.500.000
5		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	29.986.540



No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
6		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	9.978.440
7		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	9.810.000
8		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	9.810.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			Rp. 21.975.470
9		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	21.975.470
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	78 %	Rp.102.777.045
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
10		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	46.199.585
11		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3073 Keluarga	36.592.500
12		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9460 Orang	19.984.960
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100 %	Rp. 49.990.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
13		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	49.990.000



No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Percentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100 %	Rp. 76.945.900
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
14		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	76.945.900
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kategori kelurahan	100 %	Rp. 43.885.410
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
15		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	43.885.410
		PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Percentase lembaga masyarakat yang aktif	100 %	Rp. 2.640.884.280
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
16		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	484.069.410



No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
17		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25 Unit	969.062.340
18		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	24.999.800
19		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	62.752.730
20		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	1.100.000.000

Sumber : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024 DINSOSPM



Program prioritas dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) program prioritas, 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan prioritas. Selanjutnya untuk program pendukung terdapat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2. 4 Program dan Kegiatan Pendukung Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi	
				K	Rp
1	2	3	4	5	
1	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	4.097.410.201
			Nilai SAKIP	72/B	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/bulan	3.504.422.911
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	55.386.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
3		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
4		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.494.400
5		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	48.914.620
6		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.599.860
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	30.735.400
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
8		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	109.715.100



No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi	
				K	Rp
1	2	3	4		5
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
9		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000
10		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.900.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
11		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3.000.000
12		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	56.359.580
13		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	9.910.000
14		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000

Sumber : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024 DINSOSPM



Dari tabel diatas Program Pendukung DINSOSPM terdapat 1 program pendukung, 5 kegiatan pendukung dan 13 sub kegiatan pendukung DINSOSPM.

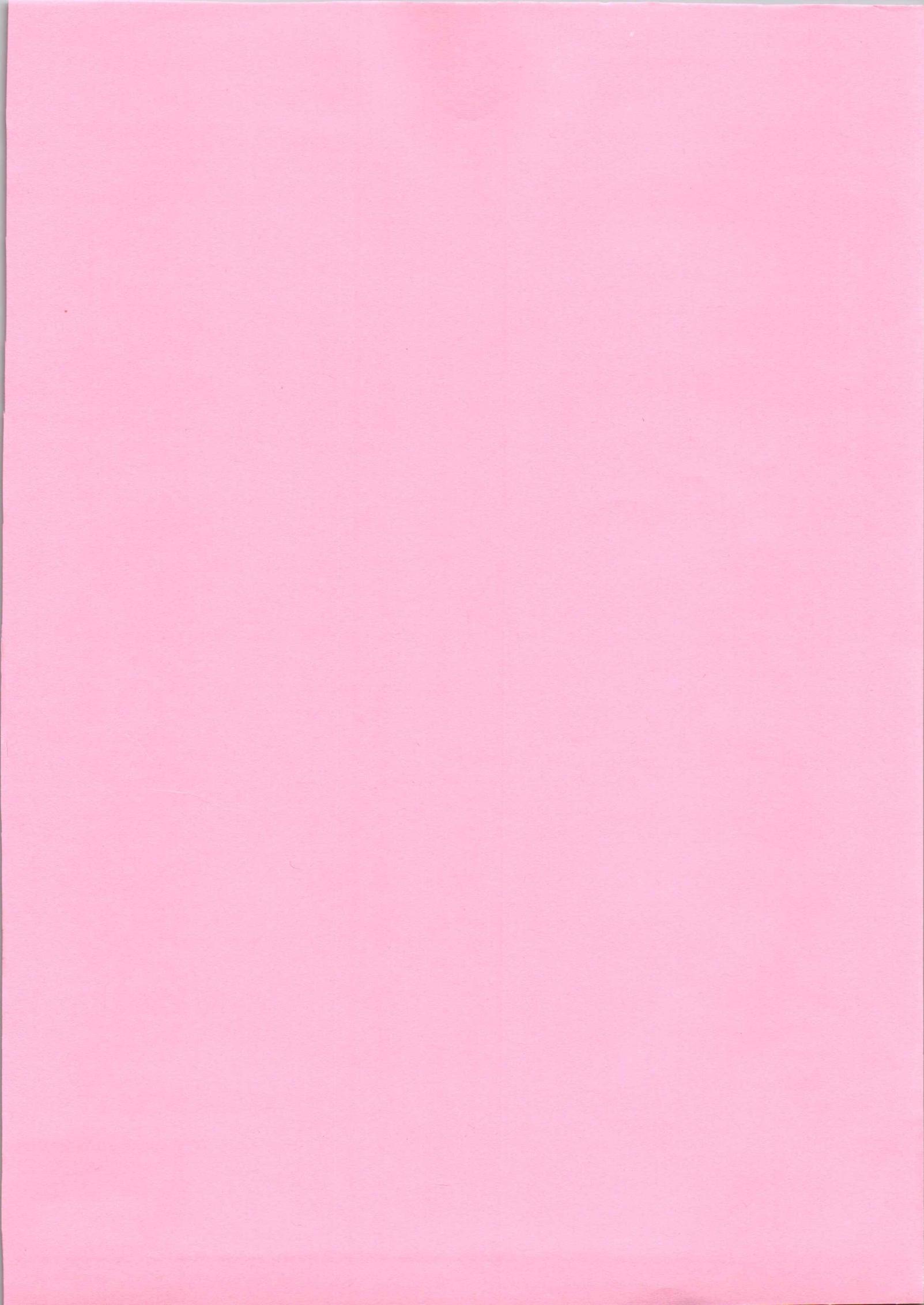
E. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019-2024, dimana terdapat 5 indikator kinerja utama, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama DINSOSPM Tahun 2019-2024

NO.	SASARAN	No.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Percentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial	%	$\frac{\sum \text{Jumlah PPKS yang Diberikan Kebutuhan Sosial}}{\sum \text{Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Kebutuhan Sosial}} \times 100 \%$	Laporan SPM, Linjamsos, Dayasos	Kepala Bidang Sosial
2	Terwujudnya Kemampuan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial	2	Percentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Meningkat Kemampuannya Dalam Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial	%	$\frac{\sum \text{Jumlah SDM Kesos (PSKS) yang ditingkatkan Kompetensinya}}{\sum \text{Jumlah SDM (PSKS) di DinsosPM}} \times 100 \%$	Laporan SPM, Linjamsos, Dayasos	Kepala Bidang Sosial
3	Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	3	Nilai Tingkat Kepuasan Pengunjung	Puas	$\frac{\sum \text{Jumlah Pilihan Puas dari Pengunjung yang dipilih lebih banyak dari pilihan tidak puas}}{\sum \text{Jumlah Pengunjung}} \times 100 \%$	Bidang Sosial	Kepala Bidang Sosial
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	4	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	$\frac{\sum \text{Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan}}{\sum \text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kepala Bidang PM
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	8	Nilai SAKIP/Predikat	Nilai	72/BB	LHE INSPEKTORAT	Sekretariat

Sumber : Renstra Perubahan DINSOSPM Tahun 2019-2024





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan tersebut , mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Pelaporan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu, Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Laporan Kinerja ini, Pengukuran Kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (*output*), dengan cara membandingkan antara target output yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai.
- 2) Pengukuran Kinerja Tujuan dan Sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara perbandingan antara target outcome yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja dengan realisasi yang dicapai.



- 3) Pengukuran Kinerja Anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil Pengukuran Capaian Kinerja terhadap seluruh capaian target Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan dan Realisasi Anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Dengan Pengukuran Capaian Kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat maka diharapkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:



**Tabel 3.1 Nilai Peringkat Kinerja
DINSOSPM Tahun 2024**

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.2 dibawah ini:



Tabel 3. 2 Capaian Kinerja DINSOSPM
Tahun 2024

No.	SasaranStrategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	5	6	7
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan rehabilitasi sosial	85,00%	85,00%	100,00%
2	Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Kesejahteraan Sosial	2	Percentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100,00%	100,00%	100,00%
3	Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	3	Nilai Tingkat Kepuasan Pengunjung	Puas	Puas	Puas/100%
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	4	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	5	Nilai SAKIP/Predikat	72/BB	60,06%	83,42%
CAPAIAN KINERJA						96.68%

*) 60,06 adalah Nilai SAKIP Tahun 2023 karena SAKIP DINSOSPM Tahun 2024 belum dievaluasi.

Sumber : Data diolah DINSOSPM Tahun 2024

Pencapaian kinerja 5 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut pada tabel 3.3 dibawah ini :

**Tabel 3. 3 Predikat Nilai Capaian Kinerja DINSOSPM
Tahun 2024**

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi	4
2	$76 \leq s/d < 90$	Tinggi	1
3	$66 \leq s/d < 75$	Sedang	-
4	$51 \leq s/d < 65$	Rendah	-
5	$0 \leq s/d < 50$	Sangat Rendah	-
Total Sasaran			5

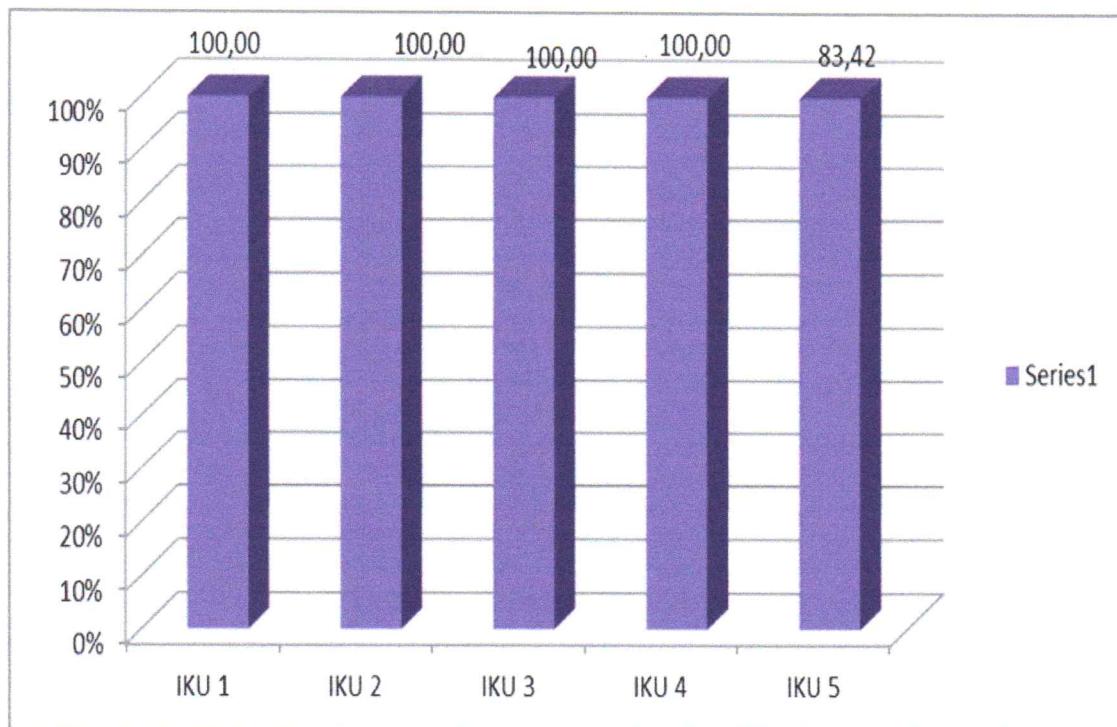
Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Melihat pada tabel 3.2 capaian kinerja DINSOSPM tahun 2024 tertinggi yaitu pada 4 (Empat) indikator kinerja dan 1 indikator kinerja dengan nilai capaian tinggi. Sasaran (1) Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan rehabilitasi sosial dengan target 85,00% realisasi 100,00% dengan tingkat capaian sebesar 100,00% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Selanjutnya capaian (2) Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan target 100,00% realisasi 100,00% predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), capaian (3) Nilai Tingkat Kepuasan Pengunjung dengan target Puas atau dengan angka capaian 100% dan cengan realisasi 100,00% (Puas) dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), (4) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan target 100% dan realisasi mencapai 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) serta (5) Nilai SAKIP/Predikat dengan target 72/BB dan realisasi 60,06 adalah Nilai SAKIP Tahun 2023 capaian sebesar 83,42%. dengan predikat kinerja Tinggi.

Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu **96.68%** dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST).



Berikut adalah Pengukuran IKU DINSOSPM Tahun 2024 seperti pada gambar 3.1 dibawah ini :



Gambar 3. 1 Pengukuran IKU DINSOSPM Tahun 2024 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Melihat pada grafik 3.1 tentang pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) DINSOSPM Tahun 2024 dari IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, dengan predikat kinerja tertinggi di IKU 1 sampai dengan IKU 4 dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00%. Jika dilakukan perhitungan capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOSPM tahun 2024 adalah sebesar **96,68%** dengan predikat Sangat Tinggi (ST).

B. Analisis Pengukuran Kinerja
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU 1) :

Sasaran Strategis 1 :

Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan rehabilitasi sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi, kebutuhan hidupnya (jasmani dan rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Dasar hukum Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah PPKS, yang mana jika tahun sebelumnya jumlah PPKS hanya sebanyak 22 jenis, saat ini bertambah menjadi 26 jenis PPKS. Adapun empat jenis PPKS baru yang dicantumkan dalam Permendes RI tersebut meliputi kategori Anak dengan Kedisabilitasan, Pemulung, Kelompok Minoritas serta Korban Trafficking.

Berikut beberapa Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024 seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 3. 2 Rapat Evaluasi Program Sembako Untuk Bantuan Sosial (Kegiatan PPKS)

Sumber : Dokumentasi Bidang Sosial DINSOSPM



Gambar 3. 3 Sumber : Data diolah DINSOSPM Dokumentasi Rapat Evaluasi Program Sembako



Gambar 3. 4 Sumber : Data diolah DINSOSPM Dokumentasi Rapat Evaluasi Kinerja TKSK dan PSM Terkait Data PPKS

Data Jumlah PPKS/PMKS yang mendapatkan bantuan sosial baik yang bersumber

dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota yang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan PPKS Kota Tarakan difasilitasi oleh

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Dapat dilihat dari Tabel 3.4

Tabel 3.4
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Bantuan Sosial dan Tertangani Tahun 2024

No	BANTUAN SOSIAL		JUMLAH		NO	TERTANGANI		JUMLAH		
	URAIAN KEGIATAN					URAIAN KEGIATAN				
	FAKIR MISKIN	JIWA	KK	JIWA		JIWA	JIWA			
1	Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) (APBN)		3960	1	Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin APBD II		31			
2	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (APBN)		5622	2	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)		9			
3	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) (APBN)	52.431		3	Data Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Mendapatkan Layanan PENELUSURAN KELUARGA Dan REUNIFIKASI KELUARGA		10			
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK Pemerintah Provinsi Kaltara)			4	Data Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan PENELUSURAN KELUARGA Dan REUNIFIKASI KELUARGA		24			
5	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK Daerah Kota Tarakan)			5	Lanjut Usia Terlantar yang Dirujuk Ke Panti Sosial Tresna Werda Marga Rahayu Tanjung Selor		68			
6	Bantuan Bagi DISABILITAS			6	Pekerja Sosial/Pendamping Sosial Melakukan RESPON KASUS berdasarkan Pengaduan dari Masyarakat/ Lembaga		183			
a	Alat Bantu Disabilitas (APBD)	7		7	Bantuan Biaya Transportasi Pemulangan Bagi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (APBN)		16			
b	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (APBN) Bantuan Permakanan	9		8	Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin APBN		2			
7	Bantuan Bagi LANSIA									

	a	Asistensi Lansia (APBN) Bantuan Berupa Permakanan	51				
	b	Alat Bantu Lansia (APBD)	4				
	c	Bantuan Kedaruratan Lansia (APBD) senilai Rp. 200.000,00	17				
8		KORBAN BENCANA ALAM	62				
9		KORBAN BENCANA SOSIAL	206				
10		KEGIATAN REUNIFIKASI (APBD)	7				
	Korban Penyalahgunaan Napza						
	a	Pelatihan Barista Coffee (APBN)	10				
11	b	Bantuan Kebutuhan Dasar (Beras, Biskuit,Susu,Minyak,Telur dan Vitamin) (APBN)	40				
	FAKIR MISKIN						
12		Asistensi YAPI (Bantuan Sosial Bagi Anak-anak Miskin Yatim Piyatu bantuan sebesar Rp.200.000/Bulan untuk Pemenuhan Kebutuhan Permakanan (APBN)	126				
13		Bantuan Layanan Kedaruratan Bagi Anak Fakir Miskin bantuan senilai Rp.200.000,00/Bulan untuk Pemenuhan Kebutuhan Permakanan (APBD)	17				
	JUMLAH		52.987	9582			343
			62.569				

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya dengan baik program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
2. Dilakukannya verifikasi dan validasi KPM langsung oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)

atau TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) yang berada di masing-masing kelurahan sehingga penerima bantuan tepat sasaran.

3. Dilakukannya pendampingan KPM, BPNT/PKH sehingga Penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
4. Tersedianya petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos Anak), petugas pendamping untuk lanjut Usia/Penyandang Disabilitas/ Day Care
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS/PPKS tepat waktu.



Gambar 3. 5 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Dokumentasi Monitoring dan Reviu



Gambar 3.6 Data Diolah DINSOSPM

Dokumentasi Penyerahan Kartu KKS KPM PKH



Gambar 3. 7 Sumber : Data diolah DINSOS

Dokumentasi Pertemuan P2K2 KPM PKH

Untuk menghitung Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan rehabilitasi sosial di tahun 2024, maka Dinas Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{Jumlah PPKS yang diberikan Kebutuhan Sosial}}{\sum \text{Jumlah PPKS yang Seharusnya Menerima Kebutuhan Sosial}} \times 100 \%$$

$$\frac{62.569 \text{ jiwa/orang}}{62.569 \text{ jiwa/orang}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun Keempat 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial	85,00%	100%

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 yaitu Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Percentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial	85,00%	85,00%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		Tahun 2022	Tahun 2023	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Terpenuhinya kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)	Percentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial	82,00%	95,43%	85,00%	85,00%	100%	100%	100%

Dari tabel pada Sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

1. Percentase (%) Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial realisasinya sebesar 85,00%. Nilai realisasi ini menunjukkan sebanding dengan target sebesar 85,00 %. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Percentase (%)Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial dikategorikan “Tinggi” Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100 %.Adapun program yang mendukung adalah :



1. Program rehabilitasi sosial

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1). Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, meliputi

Sub Kegiatan antara lain;

(1) Penyediaan Permakanan

(2) Penyediaan Sandang

(3) Penyediaan Alat Bantu

(4) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

(5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

(6) Pemberian Layanan Kedaruratan

(7) Pemberian Layanan Rujukan, dan

2). Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, meliputi *Sub*

Kegiatan antara lain;

(1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

2. Program perlindungan dan jaminan sosial

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1). Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi *Sub*

Kegiatan antara lain;

(1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

(3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

3. Program Penanganan Bencana



Dengan kegiatan sebagai berikut :

1). Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, meliputi

Sub Kegiatan antara lain;

(1) Penyediaan Makanan

Program yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja Persentase PPKS yang memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial

Analisis Capaian Program yang berasal dari sumber pendanaan APBD Kota Tarakan

1. Program Rehabilitasi Sosial

Tabel capaian program Rehabilitasi Sosial

No	Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	79,84

Tabel capaian kegiatan dan Sub Kegiatan program rehabilitasi sosial APBD

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator kegiatan	Target		Realisasi	
				K	Rp	K	Rp
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di		Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang di jangkau	335 Orang	175.026.650	259 Orang	138.764.580
0	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pernakan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	49.956.420	172 Orang	42.771.480
0	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.985.250	10 Orang	6.759.000
0	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	57.500.000	10 Orang	55.862.000
0	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	29.986.540	11 Orang	8.720.100

0	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	9.978.440	13 Orang	9.670.000
0	6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	9.810.000	34 Orang	9.810.000
0	7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	9.810.000	9 Orang	5.172.000
2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	175.026.650	97,07%	138.764.580
0	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	21.975.470	1954 Orang	18.514.260

Program tersebut di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan

didukung Kegiatan sebagai berikut :

- 1) *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.*

Pada kegiatan ini didukung 7 (tujuh) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar 79,28 % , realisasi target 259 orang dari target 335 orang sehingga capaian sebesar 77,31 %. Permasalahan tidak tercapainya dalam pemenuhan target yaitu dikarenakan tidak ditemukan atau tidak adanya sasaran atau klien (Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan serta Pengemis sehingga kegiatan tidak terlaksana secara maksimal

- 2) *Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.*

Pada kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar 84,25 % , realisasi target 1954 orang dari target 2000 orang sehingga capaian sebesar 97,07 %. Permasalahan tidak tercapainya dalam pemenuhan target yaitu karena kurangan laporan dan pengaduan baik dari masyarakat maupun dari kelurahan sehingga Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dasar tidak dapat terpenuhi. Luar Panti adalah perbandingan antara jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial terhadap total populasi penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial, dalam satuan persen, dihitung secara akumulasi selama 1 (satu) tahun. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi (upaya atau usaha yang dilakukan dalam rangka mengembalikan sesuatu pada fungsinya atau kegunaannya atau manfaatnya seperti semula) dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: 1. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari; 2. sandang; 3. alat bantu; 4. perbekalan kesehatan; 5. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar; 6. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, serta masyarakat; 7. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak; 8. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; 9. penelusuran keluarga; 10. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan 11. rujukan. Layanan pemenuhan kebutuhan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan

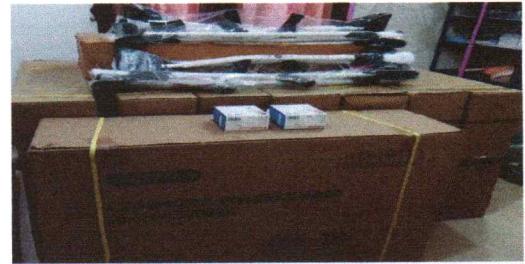
berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memberikan Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

- a. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Geladangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Ada beberapa faktor pendukung dalam tercapainya realisasi kinerja pada sasaran 1, antara lain, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;

1). PEMBERIAN ALAT BANTU



Gambar 3. 13 Sumber : Data diolah D/NSOS

Dokumentasi Penyediaan Alat Bantu



Gambar 3. 14 Sumber : Data diolah D/NSOS

3. 15 Sumber : Data diolah D/NSOS

Dokumentasi Penyediaan Alat Bantu



Gambar 3. 16 Sumber : Data diolah D/NSOS

Dari yang terlihat pada Gambar diatas, untuk Sasaran 1 telah terealisasinya capaian kinerja sebesar 100% melalui kegiatan alat bantu yang juga sebagai faktor pendukung dalam capaian tersebut.

2). PEMBERIAN LAYANAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL



Gambar 3. 17 Sumber : Data diolah DINSOS

Dokumentasi Pemberian Layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Dari yang terlihat pada Gambar diatas untuk Sasaran 1 telah terealisasinya capaian kinerja sebesar 100% melalui Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, Pemberian Layanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Pemberian Layanan Kedaruratan dan Pemberian Layanan Rujukan yang juga sebagai faktor pendukung dalam capaian tersebut.

2. Program Perlindungan dan jaminan sosial

**Tabel capaian program
Perlindungan dan jaminan sosial**

No	Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %
1.	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	80%	79,37%

Tabel capaian kegiatan dan Sub Kegiatan program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dana APBD

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Target		Realisasi		
			K	Rp	K	Rp	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang dimuktahirkan	22533 KPM	102.777.045	15386 KPM	81.578.940	
0	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10000 Orang	46.199.585	8473 Orang	37.474.940
0	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3073 Keluarga	36.592.500	3073 Keluarga	36.274.000
0	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9460 Orang	19.984.960	3840 Orang	7.830.000

Kegiatan di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Pada sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan baik APBD maupun APBN di Kabupaten/Kota, sedangkan pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga difokuskan pada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan melalui kegiatan P2K2 dan sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan pada KPM monitoring kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten/kota bagi penerima KPM dan BPNT.





Penyerahan Kartu KKS KPM PKH dan BPNT Di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



Dokumentasi Pertemuan P2K2 KPM PKH

Ada beberapa hal yang harus dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya melaksanakan Program dan kegiatan dengan sasaran Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS. Yang mana dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut menjadi kendala dan masalah bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Dengan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial ini umumnya bersifat teknis antara lain sebagai berikut :

1. Kartu KPM aktif yang tidak terisi nominal bantuan;
2. Kartu KPM yang tidak terdistribusi ke penerima bantuan;
3. KPM Aktif tidak masuk daftar BDT atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
4. KPM PKH belum semuanya terdaftar sebagai KPM BPNT;

5. Kuota BSP (Bantuan Sosial Pangan) Kota Tarakan sudah terpenuhi sehingga KPM PKH yang mengalami gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif) tidak dapat menerima BPNT;
6. Pergantian pengurus KPM sehingga buku tabungan dan ATM belum diterima oleh KPM;
7. Perbedaan pemahaman antara Bulog dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perihal supplier beras untuk penyaluran BPNT.

Dan masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dengan antara lain sebagai berikut :

1. Menyampaikan surat ke Kementerian Sosial RI terhadap Kartu KPM aktif yang tidak terisi nominal bantuan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh HIMBARA pusat Cq. Bank BNI Cabang Tarakan sebagai Bank Penyalur;
2. Melakukan kunjungan bersama pihak bank dan pendamping PKH untuk pendistribusian kartu bantuan ke KPM lansia;
3. Melakukan rekonsiliasi pelaksanaan pendistribusian KKS-BPNT setiap bulan dengan pihak Bank BNI;
4. Mengusulkan KPM Aktif masuk daftar BDT atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
5. Mengusulkan KPM PKH terdaftar sebagai KPM BPNT;
6. Mengusulkan penambahan kuota BSP (Bantuan Sosial Pangan) Kota Tarakan sehingga KPM PKH yang mengalami gagal Burekol (Buka Rekening Kolektif) dapat menerima BPNT;
7. Mengusulkan pergantian pengurus KPM sehingga buku tabungan dan ATM dapat diterima oleh KPM;
8. Melakukan edukasi ke setiap agen penyalur (e-Warong) untuk menggunakan beras Bulog dan selanjutnya pihak Bulog mempermudah agen penyalur dalam hal pembayaran setelah beras Bulog terjual.

Tercapainya sasaran "Terpenuhinya kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)" dapat diukur melalui indikator "Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Kebutuhan".

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga kinerja realisasi kurang maksimal misalnya SDM tenaga pendamping profesional di bidang kesejahteraan diperlukan demi peningkatan kapasitas bagi SDM pendamping, Selanjutnya yang menjadi hambatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pemenuhan kesejahteraan sosial. Serta jumlah anggaran yang dikelola belum proporsional apabila dibandingkan dengan jumlah pemerlu layanan kesejahteraan sosial.

3. Program Penanganan Bencana

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana merupakan suatu bermacam macam peristiwa yang terjadi mengakibatkan dampak bagi populasi manusia seperti Bencana Sosial / Kebakaran pada tahun 2024 Sebanyak 1.305 jiwa merupakan bencana yang lebih banyak oleh kelalaian manusia, bencana alam sebanyak 135 KK, suatu peristiwa alam seperti peristiwa alam dapat berupa tanah longsor dan Gelombang Laut. Jika dibandingkan tahun sebelumnya korban bencana dan penerima bantuan korban bencana pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan terjadi banyak korban kebakaran akibat kelalaian manusia. Pada Tahun 2021 penerima bantuan korban bencana sebanyak 772 jiwa, di th 2022 sebanyak 448 jiwa dan di th 2022 sebanyak 146 jiwa sementara di tahun 2023 penerima bantuan sosial sebanyak 1.440 jiwa.

Relawan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut relawan, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela



dan ikhlas.

Tabel capaian program Penanganan Bencana Anggaran

No	Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %
1.	Program Penanganan Bencana	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100%	33,12%

Tabel capaian kegiatan dan Sub Kegiatan program Penanganan Bencana Dana APBD

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	100%	49.990.000	33,12%	14.90.000
0 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	49.990.000	99 Orang	14.950.000

Kegiatan di atas tidak dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Makanan, Dimana realisasi penyeluruh bantuan bagi korban bencana alam dan sosial sebagai berikut : Penyediaan paket permakanan bagi korban bencana alam dan sosial sebanyak 99 orang dimana jumlah tersebut jauh lebih rendah dari target yang ditentukan yaitu 298 Orang. Pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu untuk korban bencana yang menerima bantuan sandang untuk korban kebakaran. Selain itu Program di atas didukung Kegiatan sebagai berikut : "Pencegahan dan perlindungan korban bencana, Korban bencana sosial yang mendapat bantuan dan Anak sekolah yang mendapat edukasi bencana.

Pada program tersebut terdapat hambatan ataupun kendala sehingga target tidak tercapai, adapun kendala yang dihadapi antara lain Kurangnya SDM yang tidak

mencukupi dikarenakan kurangnya Relawan Penanggulangan Bencana yang dimiliki.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi Anggaran APBD tahun 2024 tidak tercapai 100% karena hanya terealisasi 29,91% dengan kategori SANGAT RENDAH, tidak sebanding dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, *dengan Capaian Realisasi 100% dan Capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 33,22%.*, walaupun tidak sebanding dengan Tahun sebelum dan sesudahnya. Rendahnya capaian kinerja pada tahun 2022 disebabkan karena terbatasnya ketersediaan SDM dan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu; Karena adanya keterbatasan anggaran maka untuk pengadaan natura (makanan) tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan dapur umum pasca bencana alam dan sosial tergantung koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan maupun relawan dan jika persediaan dana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan karena tingginya jumlah bencana alam dan sosial, hanya sebatas kemampuan anggaran yang ada disamping itu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyediakan antara lain :

1. Tenda
2. Tenaga Relawan (TAGANA)
3. Dapur Umum

dan disamping itu juga adanya pendukung lainnya seperti mempersiapkan kebutuhan sandang yang berupa pakaian sekolah anak SD, selimut, baju hem, daster, kain sarung laki-laki, jarik/kain panjang untuk wanita. Dan untuk memulihkan trauma korban bencana petugas bekerja sama dengan relawan dan instansi terkait dan jika tidak bisa diatasi korban dirujuk kerumah sakit jiwa melalui pendampingan dari Kessos yang terlatih.

Ada beberapa faktor pendukung dalam terlaksananya penanganan bencana sosial, antara lain, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;



Gambar 3. 25 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Kegiatan di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Makanan. Adapun hal lain yang mendukung tercapainya kinerja pada sasaran 3 ini, yaitu; penyediaan tempat penampungan pengungsi,penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.pengungsi,penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan,dukungan psikososial.

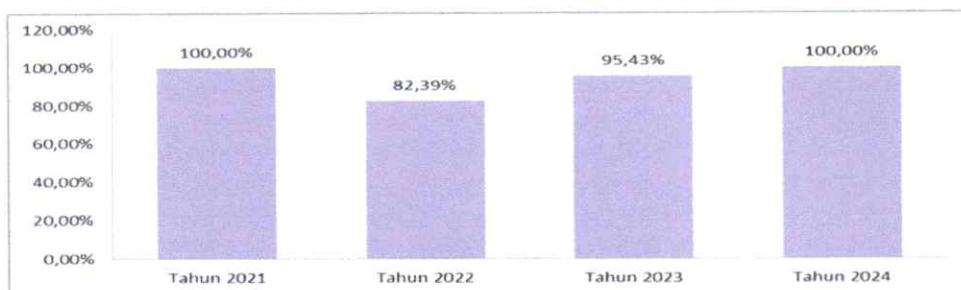
Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024

Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024. Berikut Tabel Perbandingan

Berikut adalah *Pengukuran Capaian Realisasi Tahun 2021 s/d 2024 untuk Sasaran*

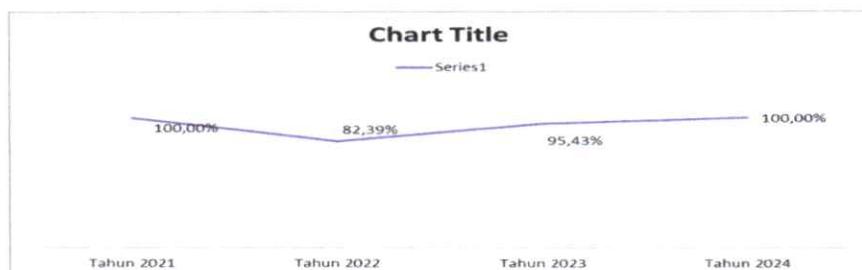
Strategis 1, dapat terlihat pada gambar 3.8 dibawah ini :



Gambar 3. 8 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram **Realisasi Capaian Sasaran Strategis 1**

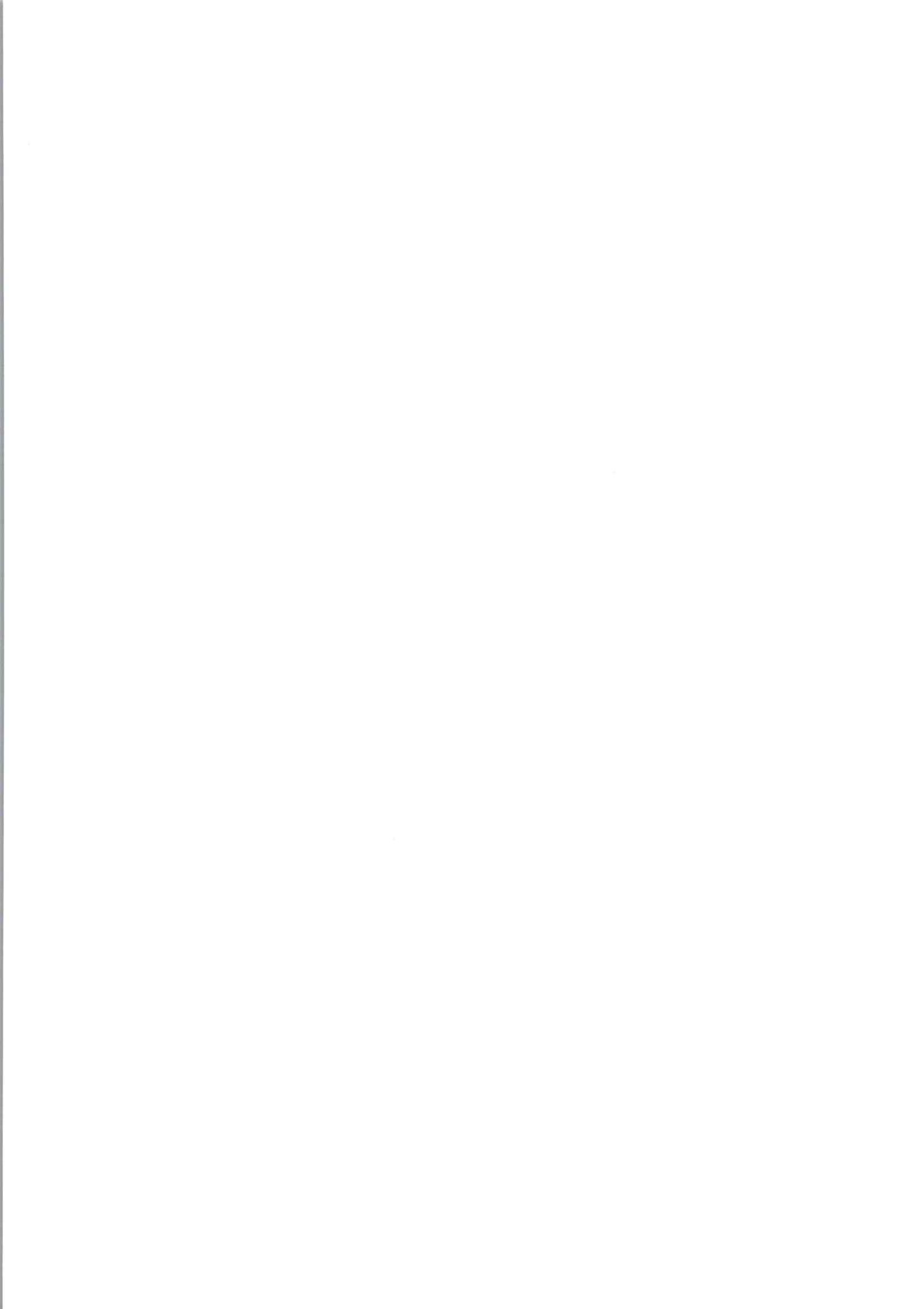
Berikut adalah *Pengukuran Capaian Kinerja* DINSOSPM Tahun 2021 s/d 2024 untuk Sasaran Strategis 1, dapat terlihat pada gambar 3.9 dibawah ini :



Gambar 3.9 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Grafik **Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2024 Realisasi untuk Sasaran Strategi 1 sebesar 85,00%, dengan kategori TINGGI, sesuai target sasaran yang ingin dicapai sebesar 85,00%, dengan capaian Kinerja Th. 2024 sebesar 100,00%, demikian juga dengan 3 tahun sebelumnya bisa dilihat pada Tabel diatas, dimana pada Th. 2021 realisasi capaian mengalami peningkatan dengan capaian realisasi sebesar 100% dengan Capaian Kinerja juga kembali meningkat menjadi sebesar 131,57% dengan kategori SANGAT TINGGI, Namun pada Th. 2022 Capaian Kinerja kembali mengalami penurunan namun demikian jumlah penerima bantuan Th. 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai, maka karena itu realisasi capaian pada Th. 2022 tetap mengalami peningkatan dengan realisasi capaian sebesar 82,39% dan dengan Capaian Kinerja sebesar 102, 99% dengan Kategori SANGAT TINGGI,



walaupun nilai capaiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan capain Th. 2021. Sedangkan di Th. 2023 realisasi capaian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan realisasi capaian sebesar 95,43% Capaian Kinerja dalam Sasaran Strategis 1 ini mengalami peningkatan sebesar 116,38% dengan Kategori SANGAT TINGGI, hal ini disebabkan adanya penduduk luar Kota Tarakan yang diberikan bantuan dimana penerima bantuan tersebut berdomisili/berada di kota tarakan pada saat bantuan disalurkan.

Tahun 2024 terealisasi sebesar 85,00% dari target sebesar 85,00% dan realisasi capaian Terpenuhinya kebutuhan Dasar PPKS 100,00%, Hal ini disebabkan karena persentase PPKS yang memperoleh Kebutuhan Dasar PPKS meningkat dibandingkan tahun 2023. Jumlah data PPKS yang menerima bantuan Tahun 2024 sebanyak 8.164 KPM sedangkan jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan di Tahun 2024 sebanyak 9.460 KPM. Di Tahun 2024 Jumlah data PMKS yang menerima bantuan sebanyak 10.636 KPM sedangkan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan di Tahun 2024 sebanyak 11.145 KPM.

Program yang telah dilaksanakan adalah pemberian sembako tunai melalui PT. Pos Indonesia dan BNI, dan Program Keluarga Harapan atau disebut juga PKH.

Dengan meningkatnya jumlah penerima bantuan yang cukup tinggi di Tahun 2024 dikarenakan terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sasaran, dimana kegiatan tersebut meliputi; Data Pemutakhiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan, Sosial (PSKS) dan Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Keberhasilan tercapainya Kinerja Sasaran 1 dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan rehabilitas sosial dikarenakan adanya faktor-faktor pendukung dalam terlaksananya program dan kegiatan tersebut diantaranya; faktor pendukung capaian Data Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial baik yang bersumber dana dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota

yang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan PPKS Kota Tarakan juga difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dalam tercapainya indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan rehabilitas sosial, selain ada faktor pendukung juga ada faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, serta bagaimana solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk bisa meraih keberhasilan capaian kinerja pada tahun berikutnya. Adapun Faktor pendukung, Faktor Penghambat dan solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut;

Faktor Pendukung

Pemberian layanan kepada warga miskin dan PPKS di Kota Tarakan tentunya tidak terbatas hanya bersumber dari APBD Kota Tarakan mengingat jumlah warga miskin dan PPKS di Kota Tarakan yang relatif tinggi, oleh karena itu kami terus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara, para perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang ikut menanggulangi permasalahan kemiskinan serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya yang ada di Kota Tarakan.

Faktor Penghambat

Salah satu faktor yang dapat menghambat ketercapaian target IKU 1 ialah masih sering terjadinya keterlambatan realisasi program bantuan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. seperti BPNT dan PKH.

Solusi

Salah satu solusi yang dikembangkan guna meminimalisir kendala tersebut ialah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin dan intensif dengan pihak perbankan dan PT. Pos selaku pihak penyulur bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial.



Tabel 3.7
Data Pemutakhiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2024

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	2 Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / TKSM	23 Orang
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	64 Orang
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	15 Orsos
5	Karang Taruna (KT)	20 lembaga
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Orsos
7	Keluarga Pioner	0 KK
8	Wahana Keluarga Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	13 Orsos
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0 Orang
10	Penyuluhan Sosial	3 Orang
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	4 Orang
12	Dunia Usaha	0 Orang

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan PPKS di daerah maka dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan PPKS di daerah yang merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, dengan data sebagai berikut :



Tabel 3.8
Data Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2024

No	Jenis Program	Th. 2023	Th. 2024
1	Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)	4.419 KPM	4.531 KPM
2	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	24 KPM	25 KPM
3	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	3.714 KK	6.967 KK
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)	66.107 Jiwa	55.828 Jiwa
5	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pemerintah Provinsi Kaltara	4.253 Jiwa	8.429 Jiwa
6	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI D) Pemerintah Daerah	19.756 Jiwa	26.643 Jiwa
7	Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin	17 Jiwa	11 Jiwa
8	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	7 Jiwa	11 Jiwa
9	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) PKH	27 Jiwa	63 Jiwa
10	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas (UEP Disabilitas)	- Jiwa	- Jiwa
11	Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	17 Jiwa	20 Jiwa
12	Tabungan Sosial Anak (TASA)	0 Anak	0 Anak
13	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	165 Jiwa	28 Jiwa
14	Pelayanan Home Care Lanjut Usia	165 Jiwa	28 Jiwa
15	Progres Lanjut Usia (Lansia)	3 Jiwa	3 Jiwa
16	Bantuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan/atau Korban Trafficking	30 Jiwa	5 Jiwa
17	Bantuan Korban Bencana Alam	65 KK	135 KK
18	Bantuan Korban Bencana Sosial/Kebakaran	82 Jiwa	1305 Jiwa
19	Bantuan UEP Tuna Susila Eks Lokalisasi	23 Jiwa	23 Jiwa
20	Program NAPZA AFTER CARE	43 Jiwa	43 Jiwa
21	Bantuan Kedaruratan Lansia	- Jiwa	15 Jiwa
22	Bantuan Progres Lanjut Usia (Lansia)	48 Jiwa	3 Jiwa

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 (IKU 2) :

Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

D

Sasaran Strategis 2 :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, permasalahan kesejahteraan sosial perlu ditangani melalui praktik pekerjaan sosial yang profesional, terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial. Peksos sebagai bagian dari Pegawai Negeri Sipil memerlukan pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme dalam ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jabatan fungsional pekerja sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Tarakan. Tugasnya yaitu melakukan pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan serta bimbingan dan pembinaan lanjut. Dalam hal untuk kenaikan jenjang, pekerja

sosial dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi yang meliputi :

1. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan



Sosial;

6. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Selain itu juga pekerja sosial dapat melaksanakan kegiatan penunjang yaitu :

- a. Pengajar/pelatih di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
- c. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
- d. Perolehan gelar/ijazah lain; atau
- e. Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

Untuk menghitung persentase jabatan fungsional pekerja sosial (peksos) yang meningkat kompetensinya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menggunakan rumus

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{ Jumlah SDM Kesos (PSKS) yang ditingkatkan Kompetensinya}}{\sum \text{ Jumlah Peksos yang Tersedia}} \times 100 \%$$

$$\frac{131 \text{ orang}}{131 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengalami capaian yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar dari capaian Tahun 2023 sebesar 100% dan sebanding dengan capaian TH. 2024 yaitu sebesar 100%.

Faktor pendukung

keberhasilan pencapaian indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan



sosial yaitu pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota targetnya dapat tercapai sehingga mempengaruhi capaian IKU.

Faktor lain yang mendukung pencapaian sasaran menurunkan angka kemiskinan yaitu tingginya minat PSKS dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial, serta adanya dukungan dari dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan pada indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya yaitu melakukan pemberdayaan sosial, perbekalan pelatihan bagi seluruh SDM PSKS yang ada dan melibatkan setiap jenis PSKS dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat

Faktor penghambat yang terlihat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat. Selain dari sektor pegawai faktor penghambat yang lainnya juga pada kondisi penerima manfaat lanjut usia itu sendiri seperti kondisi kesehatan penerima manfaat yang tidak memungkinkan, susah di ajak dalam kegiatan pelayanan, hal ini akan mengakibatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan berjalan kurang efektif dan maksimal.

Faktor penghambatnya adalah Sarana dan prasarana jalan yang kurang baik bagi lansia yang sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan lansia yang masih kuat sholat menggunakan kursi roda maka itu sangat menghambat, maka sarana dan prasarana haruslah lebih ditingkatkan lagi pemberahuannya terutama mengenai lansia yang sudah tidak kuat jalan itu harusnya lebih diperhatikan terutama mengenai jalan yang kurang bagus untuk lansia.

Solusi



Untuk Pekerja Sosial perlu adanya upaya pembinaan pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial yang ada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan melalui pelatihan khusus dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti lansia terlantar sehingga dapat meningkatkan kinerja pekerja sosial dalam proses pelayanan bimbingan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan peranannya.

Program-program yang mendukung sasaran Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu Program Pemberdayaan Sosial .

Tabel capaian program Pemberdayaan Sosial Anggaran APBD

No	Program	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	68,15%

Tabel capaian kegiatan dan Sub Kegiatan program Pemberdayaan Sosial Dana APBD

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	100%	49.990.000	33,12%	14.90.000
0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	99.836.580	83 Orang	68.043.001

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2024

Program di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung Kegiatan sebagai berikut :

Program Pemberdayaan Sosial Program ini berasal dari dana APBD mewujudkan Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecataman, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kegiatan di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung 1



(satu) sub kegiatan yaitu Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024 sasaran Persentase PSKS Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target 100 % dan realisasi 68,15% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun lalu dimana pada Tahun 2023 Persentase PSKS Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan realisasi anggaran sebesar 97,32 .

Adapun faktor penghambat dalam mencapai target salah satunya Kurangnya SDM yang tidak mencukupi dikarenakan banyaknya tenaga peksos,TKS, TKSK, PKH dan TAGANA yang tidak aktif ditingkat kelurahan dan kecamatan .

Selain adanya faktor penghambat dalam Persentase PSKS Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial namun ada juga faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Salah satu faktor pendukungnya antara lain :

1. Peran serta PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), antara lain TKSK (Tenaga Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), karang taruna. TKSK dan PSM berperan aktif dalam proses penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dana APBD maupun APBN.
2. Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder kunci yang intensif. Contohnya dalam penyaluran bantuan sosial di lapangan, banyak ditemukan kasus dobel data atau data penerima yang tidak valid. Untuk mengatasi hal ini diperlukan konfirmasi dengan pengampu data, baik data kependudukan, dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima



manfaat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data.

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Terwujudnya kemampuan dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam Kesejahteraan sosial	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung Kegiatan sebagai berikut :

Program Pemberdayaan Sosial Program ini berasal dari dana APBD mewujudkan Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dari tabel pada Sasaran Strategis 2 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

Pada Tahun 2024 Capaian IKU Sasaran 2 capaian realisasi sebesar 100 % dengan predikat sangat tinggi dan capaian tersebut sebanding dengan capaian pada Tahun 2023



dengan capaian sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 (IKU 3) :

Sasaran Strategis 3 :

Menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMP Nasional) adalah Taman Makam Pahlawan Nasional yang berada di Provinsi dan Kabupaten atau Kota di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Taman Makam Pahlawan Kota Tarakan (TMP Kota Tarakan), merupakan Makam Penghormatan bagi Pahlawan dari Kota Tarakan dan Pahlawan lainnya yang berjasa di Kota Tarakan. TMP ini sering dikunjungi diziarah warga, ada juga kegiatan Penghormatan Setiap Hari Pahlawan pada 10 Nopember setiap tahunnya untuk mengenang jasa-jasa Pahlawan Kota Tarakan.

Capaian Kinerja dari Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pada indikator kinerja ini dapat terealisasi 100%. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang mencerminkan penghargaan terhadap para pahlawan

Untuk menghitung Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Tarakan di Tahun 2023, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{ Jumlah Pilihan puas dari pengunjung yang dipilih lebih banyak}}{\sum \text{ Jumlah Pengunjung}} \times 100 \%$$

$$\frac{1 \text{ TMP}}{1 \text{ TMP}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Indikator Nilai tingkat kepuasan pengunjung mencapai realisasi sebesar 100% sebanding dengan capaian Tahun 2023 sebesar 100%.

Tabel capaian program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Anggaran APBD

No	Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %
1.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	96,70%

Tabel capaian kegiatan dan Sub Kegiatan program Pemberdayaan Sosial Dana APBD

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	76.945.900	96,70%	74.407.200
0	1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	76,946.900	1 Makam

Sumber data: hasil pengolahan Dinas Sosial Tahun 2024

Program di atas dapat dicapai berkat dukung Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Kegiatan di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024 sasaran Nilai Tingkat kepuasan pengunjung dengan target 100 % dan realisasi 96,70% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun lalu dimana pada Tahun 2023 Nilai Tingkat kepuasan pengunjung realisasi anggaran sebesar 100 %.

Rata-rata Tingkat Capaian Nilai Tingkat kepuasan pengunjung Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2021 s/d 2024 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST). Berikut adalah Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Strategis 3 DINSOSPM Tahun 2021 s/d 2024 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Terwujudnya sarana pelestarian nilai-nilai keahlawanan	Nilai Tingkat Kepuasan Pengunjung	99,89%	99,56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel perbandingan realisasi serta capaian IKS 3 dapat diketahui bahwa realisasi Rata-rata Tingkat Capaian Nilai Tingkat Kepuasan Pengunjung Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2021 s/d 2024 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST). Pada Th. 2021 Tingkat Capaian Nilai Tingkat Kepuasan Pengunjung sebesar 99,89% dengan predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), sedangkan pada Th. 2022 capaian kinerja untuk sasaran 3 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,56% dengan predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), akan tetapi pada Th. 2023 nilai capaian kinerja mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 100% dengan predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), kemudian pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 100% dengan kata lain capaian kinerja sasaran 3 sebanding dengan target yang ingin dicapai.

Rata-rata Tingkat Capaian Persentase Pengelolaan TMP Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2021 s/d 2024 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST). Berikut adalah Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Strategis 4

DINSOSPM Tahun 2021 s/d 2023 dapat terlihat pada gambar 3.27 dibawah ini :



Gambar 3. 27 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram Realisasi Capaian Sasaran Strategis 3

Berdasarkan Gambar 3.24 dan 3.25 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, sebanding dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan capaian Kinerja Th. 2023 sebesar 100%, demikian juga dengan 2 tahun sebelumnya bisa dilihat pada Gambar 3.24 dan Gambar 3.25, dimana pada Th. 2021 Capaian Kinerja mencapai 99,89% dengan kategori SANGAT TINGGI, pada Th. 2022 Capaian Kinerja juga kembali meningkat menjadi sebesar 99,56% dengan kategori SANGAT TINGGI. Sesuai dengan target yang ditentukan pada Th. 2022, dan capaian Kinerja pada Th. 2023 sebesar 100%,

Dari Gambar 3.24 dan 3.25 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tercapai sebesar 100% dengan kategori SANGAT TINGGI, setara dengan target sasaran yang ingin dicapai sebesar 100%, dengan capaian Kinerja Th. 2024 sebesar 100%, berbeda dengan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 99,56% dengan kategori SANGAT TINGGI, Pencapaian 100% ini didukung besarnya anggaran untuk Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan senilai Rp. 76.945.900,- dan melalui Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dan didukung oleh Sub Kegiatan yaitu; Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung

Ada beberapa faktor pendukung dalam tercapainya realisasi kinerja pada sasaran 3 Yaitu

- Tersedia sarana dan prasarana bagi pengunjung TMP, SDM yang memadai serta pemeliharaan TMP.
- Taman makam pahlawan dipergunakan oleh masyarakat dan pihak terkait untuk kegiatan ziarah kepahlawanan

Faktor penghambat

- Belum adanya perencanaan sistematis pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
- Adanya kerusakan sarana prasarana yang tidak mampu ditangani oleh dinas sosial untuk perbaikan
-

Solusi

Saran dan solusi yang diberikan adalah kira-kira Taman Makam Pahlawan (TMP) ini melakukan penataan ulang yang sesuai dengan standardisasi dan menyiapkan berbagai sarana-sarana pendukung untuk meningkatkan efektivitas, keamanan dan daya tarik pengunjung dari Taman Makam Pahlawan (TMP) seperti :

1. Kantor, berfungsi sebagai bagunan administrasi pengurusan TMP seperti pencatatan dan pelaporan bagi pemakaman dan para penziarah, serta tempat penyimpanan arsip riwayat hidup dan lain-lain.
2. Perpustakaan, merupakan sarana pelestarian nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan.
3. Buku ruang tamu, berfungsi sebagai tempat pengisian dan pendataan tamu dalam rangka kegiatan upacara dan ziarah.
4. Gudang, tempat penyimpanan peralatan.
5. Gardu jaga, berfungsi sebagai pos penjagaan untuk keseluruhan TMP.



Faktor Pendukung Keberhasilan capain sasaran 3 antara lain, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;

DOKUMENTASI KEGIATAN UPACARA DAN ZIARAH TAMAN MAKAM PAHLAWAN DWIKORA KOTA TARAKAN



Gambar 3. 29 Sumber : Data diolah DINOSOPM
Kinerja Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 (IKU 4) Sasaran Strategis 4 :

Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

Dasar hukum Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Kelurahan (LAD).

Adapun jenis LKD paling sedikit meliputi:

1. Rukun Tetangga (RT)
2. Rukun Warga (RW)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna
5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Sasaran Strategis 6 dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, maka maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\sum \text{ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100 \%$$

$$\frac{76 \text{ Lembaga}}{76 \text{ Lembaga}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Tahun Keempat 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	100%

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan capaian Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	100%	100%

**Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra (%)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	104,16%	98,71%	98,41%	98,41%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel perbandingan realisasi serta capaian IKS 4 dapat diketahui bahwa realisasi Rata-rata Tingkat Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2021 s/d 2024 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST). Pada Th. 2021 Tingkat Capaian

Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan sebesar 104,16% dengan predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), dengan kata lain capaian kinerja sasaran 4 mengalami peningkatan, capaian kinerja melebihi dari target yang ingin dicapai dimana target yang ditentukan pada tahun 2021 sebesar 100%, sedangkan pada Th. 2022 capaian kinerja untuk sasaran 4 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,71% dengan predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), dan pada Th. 2023 nilai capaian kinerja mengalami penurunan dari capaian Th. 2022 dengan capaian sebesar 98,41% dengan predikat kategori SANGAT TINGGI (ST), kemudian pada tahun 2024 capaian kinerja sebesar 100% dengan kata lain capaian kinerja sasaran 4 sebanding dengan target yang ingin dicapai.

Rata-rata Tingkat Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2021 s/d 2024 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST). Berikut adalah Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Strategis 4 DINSOSPM Tahun 2021 s/d 2024 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :

Diagram Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Tahun 2024



Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram Realisasi Capaian Sasaran Strategis 4

Dari tabel pada Sasaran Strategis 4 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

Persentase (%) Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata tingkat capaian di Th. 2021 s/d Th. 2024 dengan predikat kinerja sangat tinggi(ST). Pada Th. 2022 tingkat capaian persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan sebesar 98,71% dengan predikat kategori Sangat Tinggi (ST), sedangkan pada Th. 2023 capaian kinerja mengalami penurunan dan lebih rendah dari capaian Th. 2022 dengan capaian sebesar 98,41, dengan kata lain hampir sebanding dengan capaian kinerja Th. 2022, pada Th. 2024 capaian kinerja mengalami kenaikan dengan realisasi capaian sebesar 100%. Nilai realisasi ini menunjukkan sebanding dengan target yang ingin dicapai yaitu sebesar 100 %. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dikategorikan “Sangat Tinggi” Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100 %.Adapun program yang mendukung adalah :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa meliputi *Sub Kegiatan* antara lain;
 - (1) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta



Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi *Sub Kegiatan* antara lain;

(1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

(2) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

(3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

(4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

(5) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel capaian program Administrasi Pemerintahan Desa

No	Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kategori kelurahan	100%	86,03

**Table capaian kegiatan dan Sub Kegiatan program Administrasi Pemerintahan Desa
Dana APBD**

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Kelurahan	100%	43.885.410	100%	37.754.909
0	1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	43.885.410	2 Dokumen 37.754.909



Program tersebut di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung *Kegiatan* sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa meliputi *Sub Kegiatan* antara lain;

- (1) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Pada kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar 86,03 % , realisasi target 2 dokumen dari target 2 dokumen sehingga capaian sebesar 100 %.

Sasaran 4 Indikator sasaran 4, Program yang menunjang tercapainya capaian kinerja Sasaran 4 Indikator Sasaran 4 adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan tujuan memberikan Pembinaan Perkembangan Desa serta Kelurahan.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Tabel capaian program Pemberdayaan Lembaga, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

No	Program	Indikator Program	Target %	Realisasi %
1.	Program Pemberdayaan Lembaga, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	87,26%



Tabel capaian kegiatan dan Sub Kegiatan program Pemberdayaan Lembaga, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dana APBD

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	100%	2.640.884.280	87,26%	2.304.450.270
0 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	484.069.410	8473 Orang	205.598.657
0 2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	969.062.340	10 Unit	930.47.023
0 3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	24.999.800	1 Dokumen	16.032.420
0 4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	62.752.730	1 Laporan	52.362.170
0 5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	1.100.000.000	25 Dokumen	1.100.000.000

Kegiatan di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung 5 (lima) sub kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan realisasi anggaran sebesar 205.598.657 atau sebesar 42,47%, pada sub kegiatan Fasilitasi



Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat realisasi anggaran sebesar 930.47.023 atau sebesar 96,02%, sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa anggaran terealisasi sebesar 16.032.420 atau 64,13%, sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna terealisasi sebesar 52.362.170 atau 83,44% dan untuk sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga anggaran terealisasi sebesar 1.100.000.000 atau terealisasi 100%.

Pada Sasaran 4 Indikator Sasaran 4, adapun program yang menunjang tercapainya capaian kinerja sasaran 4 adalah: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan yaitu: Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan TTG. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh berguna bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan tepat sasaran adalah teknologi tersebut telah sesuai untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan berguna adalah teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dan mampu memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian indikator ini dilaksanakan Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Hal ini disebabkan karena Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

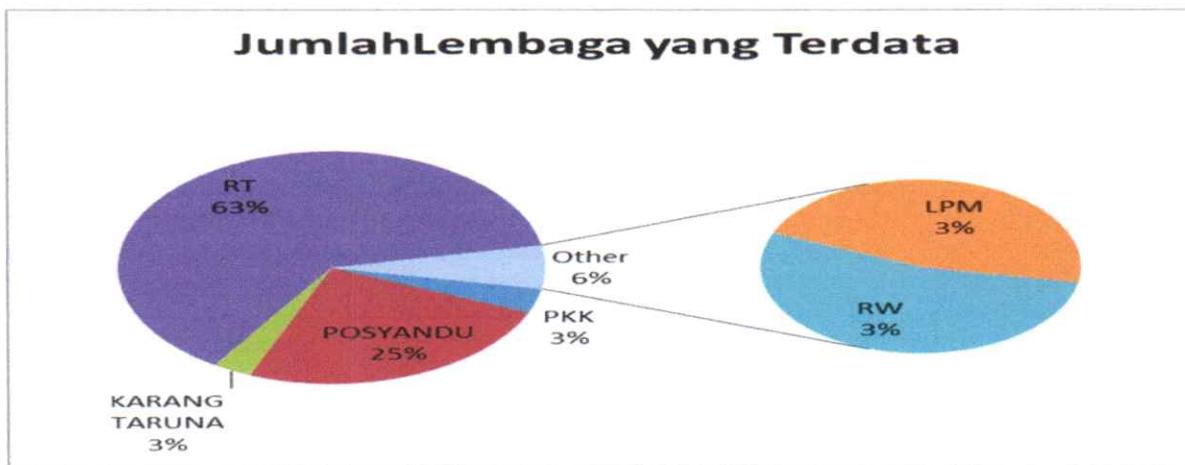


sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebanyak 713 Lembaga Kemasyarakatan Sedangkan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terdata sebanyak 717 (PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, RT dan RW) di seluruh Kelurahan Kota Tarakan. Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Kota Tarakan dan dibina oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.19
Data Lembaga Kemasyarakatan (LK) yang Berpartisipasi Membangun Kelurahan
Kota Tarakan Tahun 2024

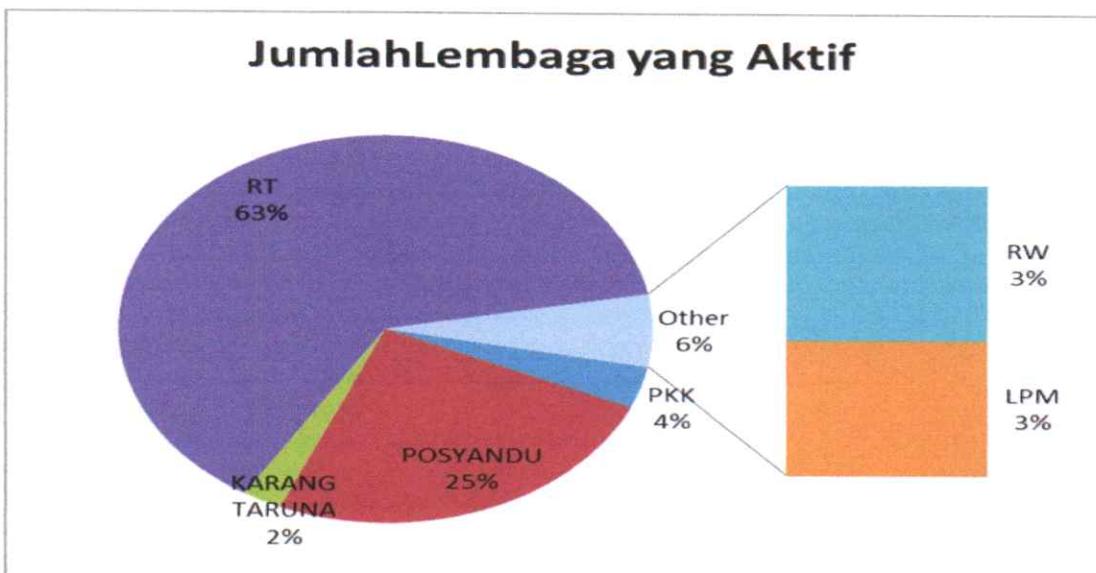
No	Jenis Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang Terdata	Jumlah Lembaga yang Aktif	Jumlah Lembaga yang Tidak Aktif
1	PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan)	25	25	-
2	Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu)	178	178	-
3	Karang Taruna (KT)	21	17	4
4	RT (Rukun Tetangga)	450	450	-
5	RW (Rukun Warga)	23	23	-
6	LPM (Lembaga Pemberdayaan	20	20	-
Jumlah Lembaga.....		717	713	4

*Diagram Lembaga Kemasyarakatan (LK) Yang Berpartisipasi Membangun Kelurahan
Kota Tarakan Tahun 2024*



Sumber : Data diolah DINOSOPM

Bidang Pemberdayaan Masyarakat



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksanannya penyuluhan pada Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM di kelurahan.
2. Terlaksananya pembinaan langsung terhadap Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM.
3. Terlaksananya pendampingan setiap pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM di kelurahan.
4. Tersedianya tim juri lomba kelurahan yang kompeten dari beberapa instansi yang terkait.
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan sangat baik.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui Jumlah Lembaga Masyarakat di Kota Tarakan pada Th. 2023 Yang Terdata sebanyak 717 lembaga dan pada Gambar 3.35 dapat

diketahui Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Aktif sebanyak 713 lembaga. Perbedaan Jumlah Lembaga Masyarakat di kota Tarakan disebabkan adanya lembaga yang tidak aktif pada tahun 2023, Adapun jumlah Lembaga yang tidak aktif tersebut yaitu Karang Taruna (KT) sebanyak 3 (tiga) lembaga.

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa sasaran 4 dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan telah terealisasi dengan baik dan mencapai nilai kinerja dengan predikat kategori Sangat Tinggi (ST). Dalam pencapaian tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun Hambatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Musrembang meliputi tiga ialah hambatan struktural, hambatan administrative dan hambatan sosial.

Partisipasi Masyarakat merupakan kunci utama dalam berhasilnya Pembangunan. Dilaksanakannya roda pemerintah dan dibukanya kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta dalam program-program yang direncanakan menjadikan pelaksanaan pembangunan disuatu desa berhasil dalam mencapai kesejahteraan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih belum terlihat keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memberikan pemikiran/ide-ide dan masukan pada kegiatan yang dilakukan serta kurangnya dalam meningkatkan kebersihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam Pembangunan serta melihat faktor penghambatnya.

(1) Faktor pendukung

1. Keingintahuan masyarakat tentang pembangunan
2. Masyarakat merasakan manfaat hasil pembangunan.

partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Tarakan sudah cukup baik baik, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan



Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Adapun Faktor yang menjadi kendalanya yaitu;

(2) Faktor penghambat

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian masih rendah,
2. Tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah,
3. Kurangnya inisiatif masyarakat,

(3) Solusi

Saran untuk mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Ada beberapa faktor pendukung dalam tercapainya realisasi kinerja pada sasaran 4, antara lain, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini;

DOKUMENTASI KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LK) PADA DINSOSPM KOTA TARAKAN



Gambar 3. 36 Sumber : Data diolah DINSOSPM

Kinerja Sasaran Strategis 4
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (LK)



INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 (IKU 5):
Sasaran Strategis 5 :

Nilai SAKIP/Predikat

Tahun Anggaran 2024, target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan Nilai Target “72 BB”. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Tata Kelola Organisasi yang baik dapat dilihat dari tahapan perencanaan dan penganggaran, tahapan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pertanggungjawaban yang baik. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan dalam pencapaian target kinerja terdiri dari 8 (delapan) Program Prioritas yang mengakomodir, 13 (tigabelas) Kegiatan Prioritas dan 33 (tigapuluhan tiga) Sub Kegiatan Prioritas, dan selanjutnya 1 Program Pendukung yang mengakomodir 5 (lima) Kegiatan dan 13 (tigabelas) Sub Kegiatan dalam pencapaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Th. 2023.

Perhitungan capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk indikator ini, menggunakan Rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{ Realisasi}}{\sum \text{ Target}} \times 100 \%$$

$$\frac{60,06}{72,00 \text{ BB}} \times 100\% = 83,42\%$$

*) 60,06 adalah Nilai SAKIP Tahun 2023 karena SAKIP DINOSOPM Tahun 2024 belum dievaluasi. Sumber : Data diolah DINOSOPM Tahun 2024

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Keempat 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP/Predikat	72/BB	-

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian Indikator Nilai SAKIP/Predikat secara rinci dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Persentase Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP/Predikat	72/BB	-	-

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Nilai SAKIP perangkat daerah ditahun 2022 di target predikat B dengan realisasi B dengan capaian kinerja 100 %. Untuk tahun 2024 Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditarget BB, namun realisasi belum dapat disajikan karena belum dilakukan penilaian.

Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Th. 2021 S/d Th. 2024

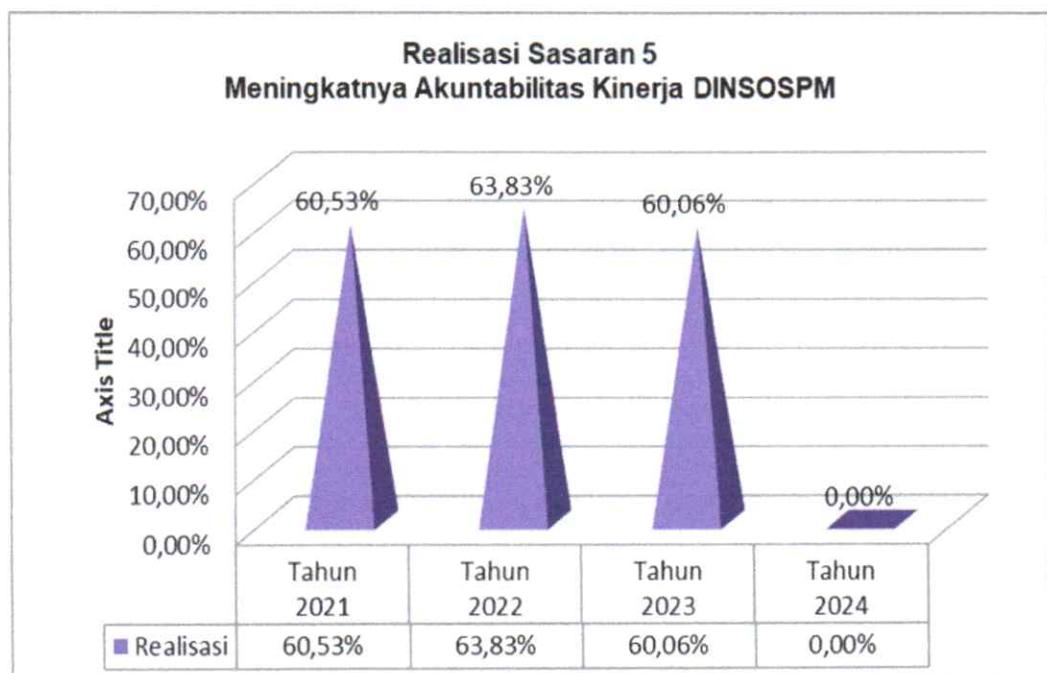
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Kinerja Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d saat ini thd target akhir Renstra(%)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target (%)	Realisasi(%)	Capaian (%)		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP/Predikat	97,63%	96,71%	83,42%	72/BB	-	-	100%	-



Berdasarkan Tabel perbandingan realisasi serta capaian IK5 5 dapat diketahui bahwa realisasi Rata-rata Tingkat Capaian Nilai SAKIP/Predikat Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dari Th. 2021 dan Th. 2022 dengan predikat kinerja sangat tinggi (ST), Sedangkan Pada Th. 2023 Tingkat Capaian Nilai SAKIP/Predikat Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami penurunan dengan predikat kinerja Tinggi (T). dengan kata lain capaian kinerja sasaran 5 mengalami penurunan, capaian kinerja kurang dari target yang ingin dicapai dimana target yang ditentukan pada tahun 2023 sebesar 100% (66/B).

Berikut adalah Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Strategis 5 DINSOSPM Tahun 2021 s/d 2024 dapat terlihat pada gambar dibawah ini :

Diagram Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2024



Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram **Realisasi** Sasaran Strategis 5

**Diagram Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5
Tahun 2024**



Sumber : Data diolah DINSOSPM

Diagram **Capaian** Sasaran Strategis 5

Dari tabel pada Sasaran Strategis 5 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut:

1. Persentase (%) Nilai SAKIP/Predikat dapat diketahui bahwa realisasi rata-rata tingkat capaian di Th. 2021 s/d Th. 2022 dengan predikat kinerja sangat tinggi(ST). Pada Th. 2023 tingkat capaian persentase (%) Nilai SAKIP/Predikat sebesar 83,42% dengan predikat kategori Tinggi (T), pada Th. 2023 capaian kinerja mengalami penurunan dan lebih rendah dari capaian Th. 2022 dengan capaian sebesar 96,71, dengan kata lain hampir sebanding dengan capaian kinerja Th. 2021. Hal ini dapat disimpulkan Capaian Indikator Kinerja Utama persentase (%) Nilai SAKIP/Predikat pada Th. 2023 dikategorikan “Tinggi” Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 100 %, sedangkan untuk capaian persentase (%) Nilai SAKIP/Predikat Th. 2024 masih di evaluasi. Adapun program yang mendukung adalah :

Tabel Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dana APBD

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Target		Realisasi	
			K	Rp	K	Rp
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	3.559.808.911	89,08%	3.171.103.589
0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3.504.422.911	88,94%	3.116.857.589
0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	55.386.000	97,94%	54.246.000
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	100%	99.744.280	83,14%	82.924.949
0 3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	2.494.400	73,81%	1.841.233
0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	48.914.620	78,38%	38.336.845
0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	17.599.860	87,10%	15.328.970
0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	30.735.400	89,21%	27.417.901
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	100%	109.715.100	94,79%	104.000.000
0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	109.715.100	94,79%	104.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	100%	93.700.000	87,71%	82.185.904
0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1.800.000	100%	1.800.000
0 9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	91.900.000	87,47%	80.385.904



5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	100%	319.269.580	96,48%	308.047.014
1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	3.000.000	87,57% 2.627.100
1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	56.359.580	95,49% 53.815.900
1	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	9.910.000	80,52% 7.980.000
1	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	250.000.000	97,45% 243.624.014

Kegiatan di atas dapat dicapai dalam satu tahun anggaran dan didukung 13 (tiga belas) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 88,94%, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 97,94%, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 73,81%, Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 78,38%, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 87,10%, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 89,21%, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 94,79%, Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 100%, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 87,47%, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 87,57%, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 95,49%, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar



80,52%, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Realisasi Capaian Kinerja sebesar 97,45%.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berjalan sangat baik. Adanya anggaran yang tidak terserap dari belanja di luar Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN umumnya dikarenakan adanya sisa dari belanja pengadaan,. Kondisi ini tidak mengurangi dari output maupun outcome yang sudah ditargetkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2024.

(1) Faktor pendukung

1. Pimpinan selalu berupaya untuk penertiban administrasi sehingga meningkatkan kualitas kerja dan penataan administrasi penanganan yang lebih baik dari sebelumnya.
2. Pimpinan melakukan pemantauan pencapaian kegiatan dan melakukan analisis pemecahan masalah dengan cepat.

(2) Faktor penghambat

1. Kurang tenaga administrasi dalam bidang dan sub bidang umum, kepegawaian pengelolaan keuangan dan perencanaan, sehingga tidak terlaksananya administrasi dengan baik secara efektif dan efesien.
2. Kurangnya sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, (PC, laptop, Printer, dll)
3. Masih kurangnya pelaksanaan bimtek, workshop bagi peningkatan SDM

(3) Solusi

Upaya untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran di tahun selanjutnya, Dinas Sosial Kota Tarakan akan lebih cermat dalam menyusun rencana kerja anggaran dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.



C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
 - b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 3. 22 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program	Anggaran		Capaian Anggaran (%)	KET
						Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Percentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi sosial'	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	102.777.045	81.578.940	79,38%	SANGAT EFISIEN
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	197.002.120	157.278.840	79,84%	
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	49.990.000	14.950.000	29,91%	
2	Terwujudnya Kemampuan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial	2	Percentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Meningkat Kemampuanya Dalam Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	99.836.580	68.043.001	68,16	SANGAT EFISIEN
3	Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanaan		Nilai Tingkat Kepuasan Pengunjung						
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	4	Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	43.885.410	37.754.909	86,03	SANGAT EFISIEN
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat		Nilai SAKIP/Predikat		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.640.884.280	2.304.450.270	87,26	
Rata-rata Kinerja				96,68		7.393.559.206	6.486.724.616	87,73	

Sumber Data : Diolah DINOSOPM

Dari tabel Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024 diatas diketahui bahwa tingkat serapan anggaran dalam mencapai sasaran strategis sebesar 87,73 % dengan rata-rata capaian kinerja sasaran DINSOSPM sebesar 96,68% dengan kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja dan serapan anggaran tersebut terdapat 4 indikator sasaran kategori SANGAT EFISIEN dan 1 indikator sasaran kategori KURANG EFISIEN. Indikator ke-5 yaitu Nilai SAKIP/Predikat dengan sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan Kurang Efisien karena capaian kinerja pada Tahun 2023 hanya mencapai sebesar 60,06% tidak cukup baik mensupport capaian kinerja, Capaian kinerja tersebut dikarenakan belum terlaksananya evaluasi Sakip Tahun lalu hasil penilaian dan rekomendasi dari inspektorat Kota Tarakan, adapun belum terlaksananya evaluasi dan rekomendasi dari inspektorat dikarenakan kurangnya SDM dan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor pendukung dalam terealisasinya tugas dan pekerjaan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pengesahan anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2024, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.23

Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	KEUANGAN 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun yang dievaluasi			
			Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	9.956.880	9.690.000				
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	99.836.580	68.043.001	68,16%			
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Percentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	197.002.120	157.278.840	79,84%			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	49.956.420	42.771.480	85,62%			
3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	7.985.250	6.759.000	84,64%			
4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	57.500.000	55.862.000	97,15%			

5	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29.986.540	8.720.100	29,08%
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	9.978.440	9.670.000	96,91%
7	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.810.000	9.810.000	100,%
8	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.810.000	5.172.000	52,72%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.975.470	18.514.260	84,25%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	102.777.045	81.578.940	79,37
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
10	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	46.199.585	37.474.940	81,12%
11	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	36.592.500	36.274.000	75,49%
12	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	19.984.960	7.830.000	39,18%
PROGRAM BENCANA	PENANGANAN	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	49.990.000	14.950.000	29,91%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
13	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	49.990.000	14.950.000	29,91%

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	layanan taman	76.945.900	74.407.200	96,70%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		76.945.900	74.407.200	96,70%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kategori kelurahan	43.885.410	37.754.909	86,03%	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
15	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		43.885.410	37.754.909	86,03%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	2.640.884.280	2.304.450.270	87,26%	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		484.069.410	205.598.657	42,47%
17	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		969.062.340	930.457.023	96,02%
18	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		24.999.800	16.032.420	64,13%
19	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		62.752.730	52.362.170	83,44%

20	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.100.000.000	1.100.000.000	100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	4.182.237.871	3.748.261.456	89,62%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.504.422.911	3.116.857.589	88,94%
22	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.386.000	54.246.000	97,94%
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.494.400	1.841.233	73,81%
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48.914.620	38.336.845	78,38%
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17.599.860	15.328.970	87,10%
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.735.400	27.417.901	89,21%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	109.715.100	104.000.000	94,79%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	100%
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	91.900.000	80.385.904	87,47%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.000.000	2.627.100	87,57%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56.359.580	53.815.900	95,49%
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9.910.000	7.980.000	80,52%
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	250.000.000	243.624.014	97,45%
Rata-rata capaian kinerja (%)					86,93%

Sumber : Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024 DINSOSPM

Dari tabel diatas dapat kita lihat perbedaan besaran untuk anggaran prioritas dan pendukung adalah lebih besar untuk anggaran pendukung, dan hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.24. Anggaran dan Rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan DINSOSPM Kota Tarakan

NO	ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PRIORITAS	4.182.237.871	3.748.261.456	89,62
2	PENDUKUNG	3.211.321.335	2.738.463.160	85,27
TOTAL CAPAIAN		7.393.559.206	6.486.724.616	87,73

Sumber: Data diolah DINSOSPM Tahun 2024

2. Perbandingan anggaran dan rekapitulasi Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2024, disajikan dalam tabel 3.25 dibawah ini :

Tabel 3. 25 Perbandingan Anggaran

NO	TAHUN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	EFISIENSI(%)
1	2022	5.176.219.306	4.958.785.649	217.443.657	95,80
2	2023	6.192.151.492	5.730.817.442	461.334.050	92,55
3	2024	7.393.559.206	6.486.724.616	906.834.590	87,73

Sumber: Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DINSOSPM Tahun 2024

A. Penghargaan yang diterima Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

Untuk tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Meraih Penghargaan Atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 Oleh Ombudsman Republik Indonesia, Berdasarkan SK Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).

Penghargaan Tersebut Diserahkan Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes Kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Arbain, S.E., M.A.P, Disela-sela Kegiatan Jumpa Pagi Pemerintah Kota Tarakan, Pada Kamis (01/02/2024) Di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan.

Penghargaan Atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Di Tahun 2024 Ini Merupakan Penghargaan Yang Ketiga Kalinya, Setelah Di Tahun 2022 dan Tahun 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Juga Memperoleh Penghargaan Yang Sama.

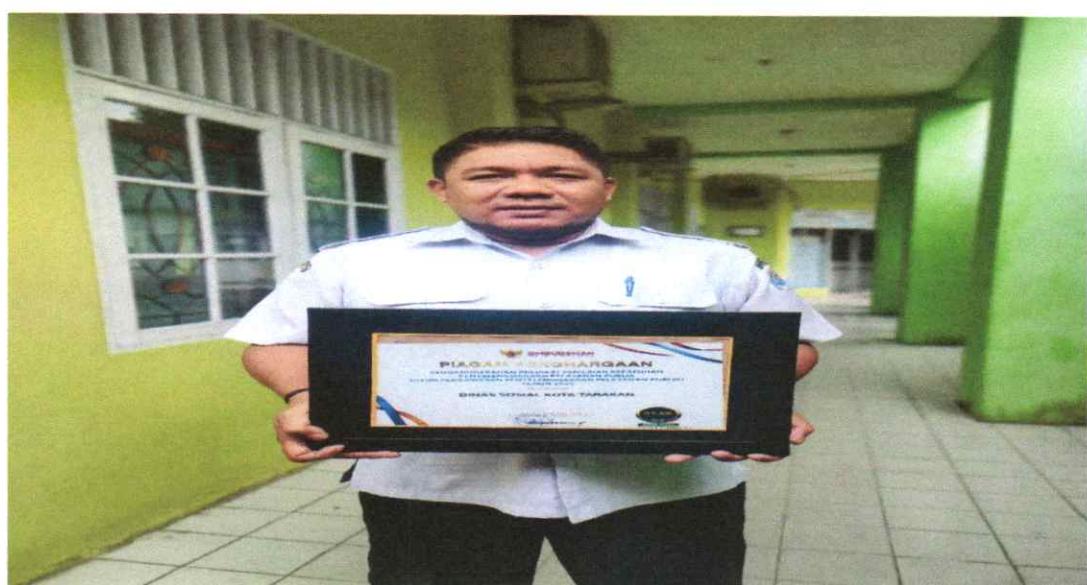
Berdasarkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Terhadap 6 (Enam) Unit Layanan untuk Periode Penilaian Bulan Juli-Oktober 2024, Secara Keseluruhan Pemerintah Kota Tarakan Memperoleh NILAI AKHIR (90.53), ZONA (HIJAU), KATEGORI (A), OPINI (KUALITAS TERTINGGI). Sedangkan Khusus Untuk Unit Layanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sendiri memperoleh NILAI AKHIR (84.46), ZONA (HIJAU), KATEGORI (B), OPINI (KUALITAS TINGGI).

Semoga Hasil Yang Diperoleh Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Bagian Dari Proses Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Serta Mendorong Pemerintah Kota Tarakan Maupun Dinas Sosial dan

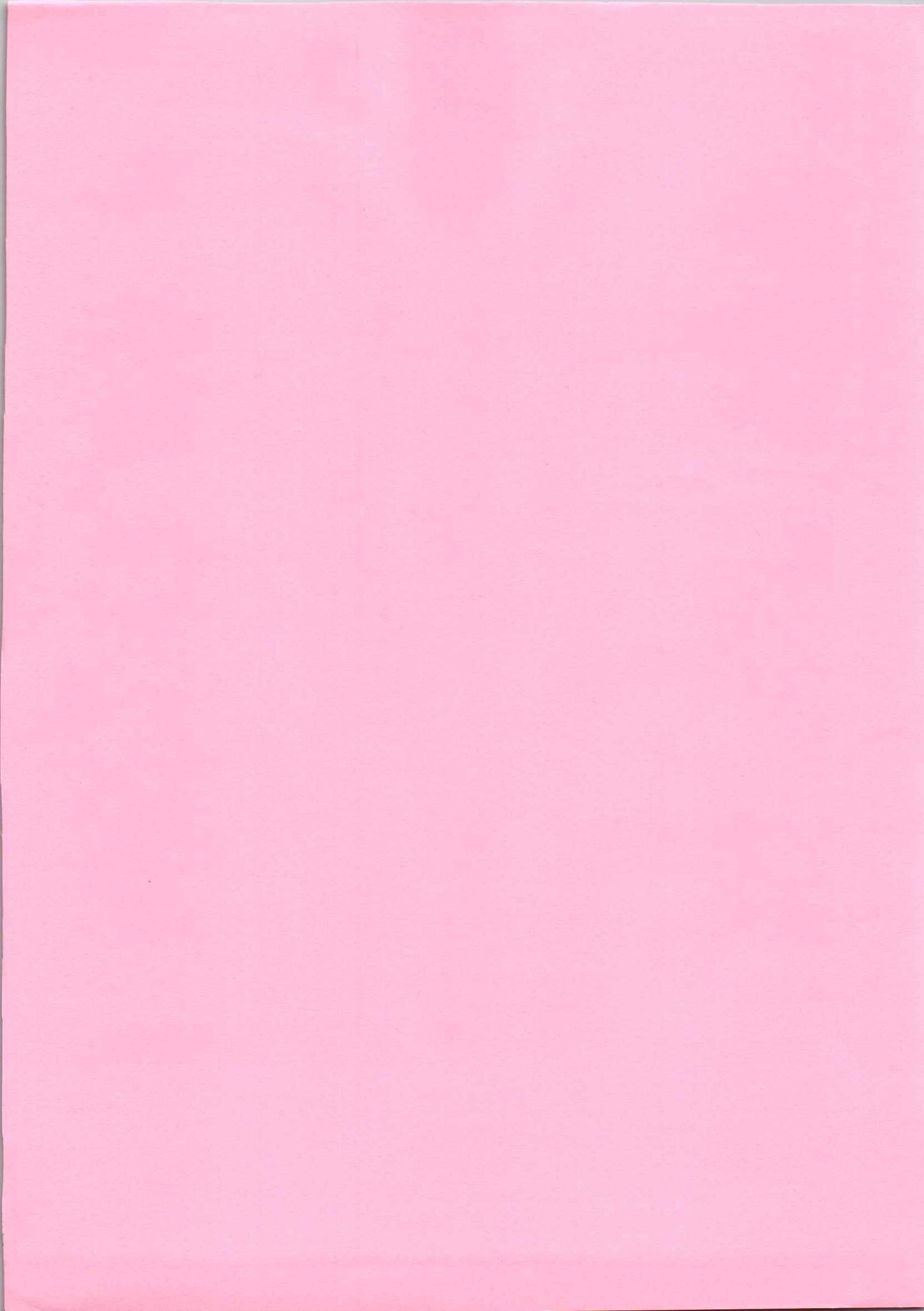


Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya, Memperkuat dan Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja, Serta Pengawasan Terhadap Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Diberikan Sebagai Hak Yang Harus Dipenuhi Kepada Masyarakat.

**DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN
PADA DINSOSPM KOTA TARAKAN TAHUN 2024**



*Gambar 3. 39 Sumber : Data diolah DINSOSPM
Kinerja Sasaran Strategis 5
Dokumentasi Penerima Penghargaan Tahun 024*



BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2024 dapat disimpulkan:

1. Empat (4) dari Lima (5) indikator sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Terwujudnya Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Kesejahteraan Sosial, Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan berhasil mengalami capaian kinerja sesuai target yang ingin dicapai. Adapun indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tidak mencapai target kinerja sesuai target yang ingin dicapai. Adapun indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tidak tercapai karena tidak tersajinya laporan pengukuran kinerja secara berkala dari pejabat eselon II dan III. Laporan pengukuran kinerja tidak tersaji dengan baik secara berkala dikarenakan tidak tersedianya fasilitas yang memadai dan SDM yang mencukupi untuk menyelesaikan laporan Pengukuran kinerja tersebut.

2. Program dan Kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing-masing sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan rehabilitasi sosial dengan tingkat capaian 100%;
 - b. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tingkat capaian 100%;
 - c. Nilai Tingkat Kepuasan Pengunjung dengan tingkat capaian 100%;
 - d. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dengan tingkat capaian 100%;
 - e. Nilai SAKIP/Predikat dengan tingkat capaian 83,42%; dan
3. faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan rehabilitasi sosial, meliputi:
 - a. Terlaksananya dengan baik program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
 - b. Dilakukannya verifikasi dan validasi KPM langsung oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) atau TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) yang berada di masing-masing kelurahan sehingga penerima bantuan tepat sasaran.
 - c. Dilakukannya pendampingan KPM, BPNT/PKH sehingga Penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
 - d. Tersedianya petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos Anak), petugas pendamping untuk lanjut Usia/Penyandang Disabilitas/ Day Care
 - e. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian

sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS/PPKS tepat waktu.

4. faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial , meliputi:
 - a. Peran serta PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), antara lain TKSK (Tenaga Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), karang taruna. TKSK dan PSM berperan aktif dalam proses penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dana APBD maupun APBN.
 - b. Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder kunci yang intensif. Contohnya dalam penyaluran bantuan sosial di lapangan, banyak ditemukan kasus dobel data atau data penerima yang tidak valid. Untuk mengatasi hal ini diperlukan konfirmasi dengan pengampu data, baik data kependudukan, dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data.
5. faktor pendorong tercapainya target indikator Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan , meliputi:
 - a. Tersedia sarana dan prasarana bagi pengunjung TMP, SDM yang memadai serta pemeliharaan TMP.
 - b. Taman makam pahlawan dipergunakan oleh masyarakat dan pihak terkait untuk kegiatan ziarah kepahlawanan
6. faktor pendorong tercapainya target indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan , meliputi:
 - a. Terlaksananya penyuluhan pada Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM di kelurahan.



- b. Terlaksananya pembinaan langsung terhadap Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM.
 - c. Terlaksananya pendampingan setiap pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM di kelurahan.
 - d. Tersedianya tim juri lomba kelurahan yang kompeten dari beberapa instansi yang terkait.
 - e. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kelurahan sangat baik.
7. faktor pendorong tercapainya target indikator Nilai SAKIP/Predikat , meliputi:
- a. Pimpinan selalu berupaya untuk penertiban administrasi sehingga meningkatkan kualitas kerja dan penataan administrasi penanganan yang lebih baik dari sebelumnya.
 - b. Pimpinan melakukan pemantauan pencapaian kegiatan dan melakukan analisis pemecahan masalah dengan cepat.
8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Berhasil melakukan efisiensi belanja langsung sebesar Rp. 6.486.724.616 atau 87,73%.

Meskipun Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan pada awal tahun; dan



3. Optimalisasi potensi, sumber daya dan jejaring kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan;
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) Indikator, adalah sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja $90 \geq 100\%$ kategori "sangat tinggi" sebanyak 5 (lima) sasaran, atau 101,43; telah mencapai batas maksimal keberhasilan;
- b) 5 (lima) sasaran tersebut telah menggambarkan keberhasilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Terwujudnya Kemampuan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Kesejahteraan Sosial, Terwujudnya Sarana Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanaan, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.

B. Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Meraih Penghargaan Atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 Oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan Atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Di Tahun 2024 Ini Merupakan Penghargaan Yang Ketiga Kalinya, Setelah Di Tahun 2022 dan Tahun 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Juga Memperoleh Penghargaan Yang Sama.



C. Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Tarakan oleh Inspektorat telah melaksanakan evaluasi SAKIP tahun 2023, Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kota Tarakan Merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar kriteria ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dibuat lebih spesifik sehingga dapat memenuhi kriteria SMART khususnya pada indikator tujuan "Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan" (Partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti apa yang akan ditargetkan agar dapat diuraikan menjadi lebih spesifik).
2. Agar dapat dibuatkan bukti komitmen pemahaman dan kedulian pencapaian kinerja individu maupun kinerja organisasi, melalui proses evaluasi kinerja individu yang didasarkan pada penetapan kinerja (PK) Pejabat Eselon II.;
3. Agar pengukuran kinerja dapat menjadi dasar dalam penyesuaian aktivitas dalam pencapaian kinerja sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut oleh manajemen Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Lampiran:



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan 77121
Telp. (0551) 21329 Faxs. (0551) 34499
Laman: <http://tarakan.go.id/dinas> Pos-el: dinospmkotatarakan@gmail.com
TARAKAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A R B A I N , SE, M.AP.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Bustan, S.E., M. Si
Jabatan : Pj. Wali Kota Tarakan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Tarakan

Dr. Bustan, S.E., M. Si

Tarakan, 04 Oktober 2024
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat

AR B A I N , SE, M.AP.
NIP. 19680318 199403 1 007

BerAKHLAK bangga
melayani bangsa



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan 77121

Telp (0551) 21329 Faxs (0551) 34499

Laman : <http://tarakan.kota.go.id/dinas> Pos-el : dinssosimkotatarakan@gmail.com

TARAKAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Sosial	85%
2	Terwujudnya kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Kesejahteraan Sosial	2	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%
3	Terwujudnya sarana pelestarian nilai-nilai keahlawanan	3	Nilai tingkat kepuasan pengunjung	Puas
4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	5	Nilai SAKIP/Predikat	72/BB

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 4.182.237.871	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 99.836.580	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 197.002.120	APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 102.777.045	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 49.990.000	APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Rp. 76.945.900	APBD

BerAKHLAK bangga
melayani
bangsa

7. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 43.885.650	APBD
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	RP 2.640.884.280	APBD
Total DPA-P Tahun 2024	Rp. 7.393.559.206	APBD

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Tarakan



Dr. Bustan, S.E., M.Si

Tarakan, 04 Oktober 2024





LEMBAR ASISTENSI KESESUAIAN FORMAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinsos PIM

Tanggal : 12/02/2025

Indikator Penilaian		Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan	Paraf analis
1.	LKIP telah menyajikan capaian dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	✓	✓		✓
2.	LKIP telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	✓	✓	Pencairan data ducuns	✓ 26/02
3.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	✓	✓	Pen-reviewsan format percairan	✓ 09/03
4.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	-	-		
5.	LKIP telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	✓	Analisis yg disajikan belum terfokus pd identifikasi mendalam atas kendala yg dihadapi	✓ 09/03
6.	LKIP telah menyajikan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	✓	Belum disajikan pd indikator	✓ 09/03
7.	LKIP menyajikan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penyataan kinerja disertai dengan foto/diagram/grafik	✓	✓	Perlu pen-reviewsan pd percairan	✓ 09/03

8.	LKIP telah menyajikan penghargaan yang telah diterima di tahun bersangkutan	✓	✓		✓
9.	LKIP telah menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya	✓	✓	kesimpulan umum yg disajikan belum mengelaskan jangka panjang perbaikan kinerja di masa mendatang	✓ (0)
	LKIP telah melampirkan :				
	a. IKU Perangkat Daerah	✓	✓		✓
	b. Perjanjian Kinerja Tahun pelaporan	✓	✓		✓
	c. Rencana Kerja/Renja Tahun Pelaporan	✓	✓		✓
	d. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	✓	✓		✓
	e. Rekap Laporan Konsolidasi Tahun Pelaporan	✓	✓		✓

Kepala Bagian Organisasi,

Sisca Maya Crenata, S.STP, M.H
Pembina / Iva
Nip. 198509052003122001





PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. (0551) 21072-21859, Tarakan 77121
Laman : <http://itwil.tarakankota.go.id> Pos-el : inspektorat@tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Tarakan, 12 Maret 2025

Inspektur,



KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	✓	

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	

CATATAN HASIL REVIU

NO.	CATATAN PERBAIKAN
1.	-



